Media Komunikasi dan Inspirasi

JENDELA Pendidikan dan Kebudayaan

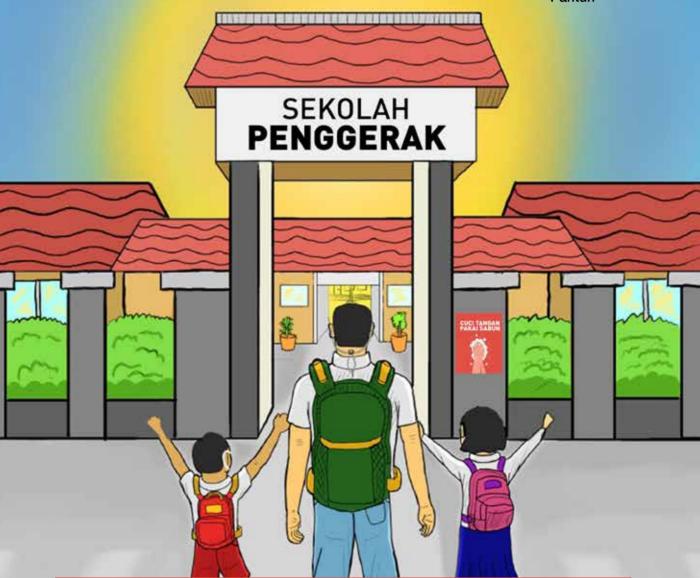
LI/Februari - 2021

Program 2021 dan Capaian 2020
Teruskan Kebijakan
Merdeka Belajar,
Menuju Kualitas SDM
Unggul

19 Capaian Program Prioritas Tahun 2020 Kebijakan di Masa

Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19 Perjalanan Pantun Jadi Warisan Budaya Takbenda Dunia

Satukan Tekad Lestarikan Tradisi Pantun



LANJUTKAN MERDEKA BELAJAR, MENUJU KUALITAS SDM UNGGUL

DAFTAR ISI

04	Salam Mas Mendikbu	d	
06	Sekilas Kemendikbud	28	Opini Kemendikbud Tanggap dan Responsif Hadapi Disrupsi Akibat Pandemi Covid-19
09	Program 2021 dan Capaian 2020 Teruskan Kebijakan Merdeka Belajar, Menuju Kualitas SDM Unggul	30	Resensi Buku Tetap Senang Seperti Belajar di Kelas
11	Sasaran Program Prioritas 2021 Berfokus pada Pembiayaan dan Pembinaan Pendidikan	31	Infografis Perpustakaan Penggunaan Koleksi Elektronik Perpustakaan Kemendikbud Tahun 2020
14	Sasaran Program Prioritas 2021 Peningkatan Kualitas Program hingga Pemajuan Kebudayaan dan Bahasa	32	Seputar Film Indonesia June & Kopi (2021) Jalinan Persahabatan Manusia dan Hewan
16	Reformasi Sistem Pendidikan di Sepanjang 2020 Merdeka Belajar dalam Enam Episode Kebijakan	35	Kebudayaan Perjalanan Pantun Jadi Warisan Budaya Takbenda Dunia Satukan Tekad Lestarikan Tradisi Pantun
19	Capaian Program Prioritas Tahun 2020 Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19	38	Kajian Praktik Baik Pengurangan Risiko Bencana Covid-19 di Sekolah
23	Relaksasi Kebijakan Selama Pandemi Ringankan Beban bagi Mereka yang Terdampak		Prinsip Humanis, Akomodasi Kebutuhan Warga Sekolah
25	Bangkit Lawan Pandemi Hadapi Korona, Mutu Pendidikan Tetap Dijaga	41	Bangga Berbahasa Indonesia Bunyi-Bunyi Bahasa (Bagian 1 : Vokal)

Sapa Redaksi

AHUN 2020 telah kita lalui bersama. Tahun di mana tantangan nyata di depan mata. Beragam kebijakan pemerintah dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana nonalam tersebut. Termasuk di sektor pendidikan dan kebudayaan. Keputusan-keputusan penting terjadi pada 2020. Tujuannya untuk melindungi seluruh warga sekolah dari penularan virus korona.

Keputusan itu misalnya peniadaan ujian nasional, penyesuaian dana Bantuan Operasional Sekolah, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan secara daring, serta pelaksanaan belajar dari rumah. Kebijakan Merdeka Belajar juga tetap berlangsung, meski di tengah pandemi.

Pada 2021, kebijakan merdeka belajar juga akan terus dilanjutkan. Tujuannya agar visi Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan SDM unggul dapat tercapai. Untuk itu, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 81,5 triliun akan lebih banyak digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jendela edisi kali ini akan mengulas program pada 2021 dan capaian yang sudah dilakukan pada 2020. Sajian ini redaksi hadirkan sebanyak 21 halaman.

Pada rubrik Resensi Buku, sebuah buku koleksi Perpustakaan Kemendikbud dapat menjadi pilihan bacaan bermutu bagi orang tua yang masih memiliki anak usia dini. Buku tersebut berisi tentang kegiatan pembelajaran di rumah yang dapat orang tua lakukan agar anak-anak tidak merasa bosan. Ulasan singkat buku ini dapat disimak pada halaman 30. Selanjutnya pada rubrik Seputar Film Indonesia, pembaca dapat membaca ulasan tentang film Indonesia pertama yang bertema persahabatan antara manusia dan hewan. Film yang dibintangi Acha Septriasa ini memiliki sejumlah fakta menarik di balik pembuatannya. Apa saja itu? Baca saja di halaman 32.

Rubrik berikutnya yang tidak kalah menarik adalah rubrik Kebudayaan yang kali ini redaksi hadirkan tentang perjalanan pantun sebelum ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. Perjalanan cukup lama sejak pengusulan di 2017 akhirnya berbuah manis pada akhir 2020 yang lalu. Sebagai pengingat kembali, redaksi juga tampilkan sekilas mengenai pengetahuan pantun yang dipelajari di bangku sekolah.

Sajian redaksi lainnya tersuguh pada edisi ini adalah rubrik Kajian dan Bangga Berbahasa Indonesia. Kedua rubrik ini dapat disimak mulai halam 38 hingga 42.

Selamat menikmati sajian Jendela edisi kali ini. Jika pembaca memiliki pertanyaan atau saran untuk majalah ini, silakan kunjungi facebook Majalah Jendela Dikbud. Tidak lupa redaksi ingatkan untuk mengunduh aplikasi Jendela pada google playstore maupun appstore agar tidak ketinggalan Jendela edisi terbaru. Selamat membaca. Salam.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Ainun Na'im
Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud Bidang
Komunikasi dan Media, Muhamad Heikal

Penanggung Jawab: Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Hendarman

Pemimpin Redaksi: Anang Ristanto Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini

Staf Redaksi: Agi Bahari, Desliana Maulipaksi, Aline Rogeleonick, Nurwidiyanto, Dwi Retnawati, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Denty Anugrahmawati, Denis Sugianto, Ryka Hapsari Putri, Lany Fitriana, Editor: Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick

Sekretariat: Sigit Supriyadi, Heri Nana Kurnia Fotografi, Desain & Artistik: BKHM

Sekretariat Redaksi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Gedung C Lantai 4, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5711144 Pes. 2413.





@kemdikbud_Rlkemdikbud.ri

Kemdikbud.Rl

jendela.kemdikbud.go.id

Salam MAS MENDIKBUD



EPERTI YANG telah kita ketahui dan alami bersama, tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan karena munculnya pandemi global. Namun situasi yang sulit bukan menjadi alasan bagi kami untuk berhenti berdaya dan berupaya memperbaiki sistem pendidikan Indonesia.

Tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan upaya peningkatan kualitas pembelajaran tetap berlangsung sekaligus memastikan kebutuhan di masa pandemi tetap terpenuhi. Hal tersebut memang telah menjadi prinsip dasar dari semua terobosan Merdeka Belajar, yakni penerapan apa yang terbaik bagi para murid dan guru demi peningkatan mutu sumber daya manusia dengan cita-cita menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, kami telah merilis terobosan Merdeka Belajar dari episode pertama hingga episode keenam. Merdeka Belajar Episode Pertama menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan: menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada Merdeka Belajar Episode Kedua, yakni Kampus Merdeka, Kemendikbud menerapkan aturan pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Selanjutnya, mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi fokus utama dari Merdeka Belajar Episode Ketiga dengan menjadikan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana sebagai prinsip dasar.

Merdeka Belajar Episode Keempat memperkenalkan paket kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) yang bertujuan pemberdayaan organisasi masyarakat dalam membangun Sekolah Penggerak. Berikutnya, Merdeka Belajar Episode Kelima memperkenalkan program Guru Penggerak yang berfokus pada pedagogi dan kepemimpinan guru serta perkembangan holistik siswa. Pada penghujung tahun 2020, kami meluncurkan Merdeka Belajar Episode Keenam yang lahir dengan fokus pembangunan SDM Unggul di jenjang pendidikan tinggi.

Kami juga berupaya tetap hadir di tengah para tenaga pendidik, murid, dan mahasiswa di seluruh Indonesia selama masa pandemi COVID-19 melalui penerapan sejumlah terobosan seperti bantuan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja; modul pembelajaran dalam kondisi khusus; keringanan dan bantuan UKT; subsidi upah untuk PTK PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, PTK Pendidikan Tinggi, serta pelaku budaya dan seni; bantuan kuota data internet untuk tenaga pendidik dan peserta didik; dan peningkatan kualitas dan kapasitas Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran.

Pada 2021, Kemendikbud akan melanjutkan upaya transformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan berfokus pada delapan prioritas, antara lain pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran, pembinaan peserta didik, pendidikan untuk guru penggerak, pelatihan kurikulum untuk guru, revitalisasi SMK, program Kampus Merdeka, dan pemajuan kebudayaan dan bahasa.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya kami sepanjang tahun 2020. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, mari mengisi hari-hari ke depan dengan kerja keras memajukan pendidikan nasional demi Indonesia maju. (*)

5



Kemendikbud Turunkan Tim Bantu Korban Bencana Alam

SETELAH mendapat kabar terjadi bencana alam di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menurunkan tim untuk membantu warga sekolah yang terdampak gempa dan banjir. Kemendikbud membuka dua posko di Sulawesi Barat, yaitu di Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Majene. Sementara di Kalimantan Selatan, posko darurat didirikan di Kabupaten

Tapin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong.

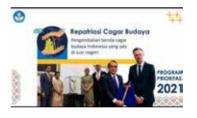
Untuk membantu para korban bencana alam, Kemendikbud bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendistribusikan bantuan. Bantuan diserahkan secara simbolis Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kalimantan Selatan.

Kemendikbud juga mendistribusikan bantuan berupa 1.800 masker kain anak, 800 paket peralatan sekolah, 100 paket peralatan menggambar PAUD, serta paket yang terdiri atas obat, selimut, sarung, dan sembako untuk warga terdampak. (RYK/RAN)

Repatriasi, Upaya Kembalikan Benda Cagar Budaya dari Belanda

DI BIDANG kebudayaan, salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2021 adalah repatriasi, yaitu pengembalian benda cagar budaya Indonesia yang ada di luar negeri. Saat ini sebagian besar benda peninggalan sejarah di Indonesia tersebar di beberapa museum di Belanda, antara lain Rijksmuseum, Museum Kebudayaan Dunia di Leiden, Amsterdam, dan Rotterdam. Koleksi museum di Belanda itu akan menjadi benda cagar budaya sasaran utama program repatriasi. Benda tersebut antara lain keris, mahkota, regalia, atau kelengkapan yang dimiliki penguasa lokal di masa lalu yang diperoleh dengan cara tidak pantas, termasuk naskah kuno.

Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan Kemendikbud adalah dengan membentuk Komite Repatriasi. Komite ini bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah, mengorganisasi kegiatan penelitian, menyusun kegiatan informasi publik,



8/10 2020

dan memastikan benda-benda tersebut kembali ke tangan Indonesia.

Keputusan repatriasi sebagai salah satu program prioritas di bidang kebudayaan ini dilatarbelakangi oleh laporan Komite Penasihat Repatriasi Benda Kolonial Belanda kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Inggrid Engelshoeven. Dalam laporan pada 8 Oktober 2020 tersebut terdapat rekomendasi mengenai rencana pengembalian artefak dan benda seni yang diperoleh Belanda dari Indonesia pada era kolonial.

Mengetahui hal tersebut, pemerintah Indonesia mengusulkan kepada Komite Repatriasi Belanda agar ada kerja sama yang setara antara para peneliti kedua negara untuk melakukan penelitian atas benda-benda kolonial tersebut. (DES/RYK)

GeNose C19, Hasil Inovasi Karya Anak Bangsa

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengapresiasi pada ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berhasil menciptakan alat pendeteksi Covid-19, GeNose C19. Alat ini secara resmi telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan pada 24 Desember 2020.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud, Nizam menuturkan, selama masa pandemi ini perguruan tinggi di Indonesia sangat sigap dalam menanggapi tantangan. "Banyak sekali karya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan tidak hanya sekadar karya yang berakhir pada aplikasi tapi karya yang menghilir pada produksi,"ujar Nizam.

GeNose C19 dapat mempercepat tracing dan tracking dengan

mendeteksi keberadaan virus melalui hembusan nafas di orofaring atau

tenggorokan melalui metabolisme VOC (Volatile Organic Compounds) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama dengan hembusan nafas ke dalam kantong khusus. Hanya dalam hitungan cepat, sesaat seseorang setelah bernafas dengan sensitivitas

90%, spesifitas 96%, akurasi 93% dengan PPV 88% dan NPV 95%.

Alat pendeteksi virus GeNose C19 ini segera dirilis pada Februari sebanyak 3.000 unit dengan harga Rp62 juta per unit. Alat ini diharapkan dapat membantu penanganan kasus Covid-19 dan diharapkan dapat segera tersebar ke seluruh Puskemas di Indonesia.

(Humas Dikti/RYK)



Sumber: kemdikbud.go.id

24/12 2020

Kemendikbud Luncurkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki komitmen yang tinggi dalam pemajuan kebahasaan dan kesastraan. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim didampingi Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Endang Aminuddin Aziz secara resmi meluncurkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka pada Jumat (29/1/2021).

Mendikbud berharap UKBI Adaptif Merdeka ini dapat memberikan dampak positif kepada penutur bahasa Indonesia dari berbagai kalangan. "Saya harap UKBI ini dapat meningkatkan aspirasi dalam memahami dan mempelajari bahasa Indonesia, menghasilkan berbagai karya tulis dan digital berbahasa Indonesia, juga melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam membawa bahasa Indonesia ke kancah internasional," harap Mendikbud.



29/01 2021

Sistem UKBI Adaptif Merdeka memiliki berbagai keunggulan, di antaranya merupakan sistem uji yang menggunakan platform teknologi mutakhir berbasis internet, seturut perkembangan teori tes berupa multi stage adaptif testing (MSAT), memiliki tingkat keandalan tinggi dengan analisis butir berdasarkan IRT (item respons theory), dan disajikan dalam bentuk yang ramah pengguna.

UKBI Adaptif Merdeka dapat mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia dari jenjang terendah hingga jenjang tertinggi. Hasil UKBI ini direpresentasikan ke dalam skor dan predikat, yaitu terbatas, marginal, semenjana, madya, unggul, sangat unggul, dan istimewa. Hasil uji ini disampaikan kepada peserta uji dalam bentuk sertifikat digital. (RYK)

GIZI UNTUK PRESTASI

STATUS GIZI seseorang mempunyai peranan penting dalam memengaruhi kemampuan berpikir, berperilaku, dan pada akhirnya berprestasi, termasuk pada anak didik di sekolah. Sebuah studi di Kanada pada lebih dari 5000 siswa menemukan bahwa siswa kelas 5 dengan diet kurang bergizi mempunyai performa buruk pada mata pelajaran sastra. Status gizi yang buruk juga membuat anak-anak rentan terhadap penyakit sehingga meningkatkan angka hari absen dari sekolah.

Untuk memastikan hal tersebut, sejak tahun 2016, SEAMEO RECFON (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition telah mengembangkan Program Gizi untuk Prestasi (Nutrition Goes to School – NGTS). Dalam program ini dilakukan intervensi kepada pihak sekolah dan guru agar siswa mempunyai pola makan seimbang dan mengkonsumsi pangan cukup nutrisi setiap harinya. Kegiatannya meliputi pengembangan modul pengajaran yang berbasis pengalaman nyata para guru dan tenaga pendidikan, pelatihan dan pengembangan kapasitas guru tentang gizi dan proyek inisiatif berbasis sekolah.

SEAMEO RECFON merupakan salah satu dari 26 pusat unggulan dari SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organisation). SEAMEO merupakan organisasi antar pemerintahan yang didirikan pada tahun 1965 oleh pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mempromosikan kerjasama regional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.



Rujukan: Annual Report SEAMEO RECFON 2019-2020; Florence, M. D., Asbridge, M., & Veugelers, P. J. Diet quality and academic performance. Journal of School Health 2008, 78(4), 209-215.; Muiru A,

Thinguri R, Njagi A, Kiarie CW. Malnutrition: Its Impact on Attendance among Primary School Pupils in Kirie Division, Embu County. Journal of Education and Practice. 2014. Vol. 5, No. 24







Cerita Guru 🔨

RUMANTAS, S.Pd.Fis

Kepala Sekolah SMPN 1 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

PROGRAM GIZI untuk Prestasi (NGTS) di sekolah kami dimulai ketika Kabupaten Sambas menjadi salah satu wilayah binaan SEAMEO RECFON di tahun 2018. Saat itu banyak tantangan untuk menjadi sekolah yang sehat, diantaranya makanan yang dijual di kantin dan di luar sekolah tidak sehat; siswa kurang pengetahuan gizi sehingga kurang mampu dengan baik mempraktikkan gaya hidup bersih dan sehat; dan sekolah kami tidak memiliki cukup ruang untuk kegiatan berkebun.

Kami menyadari bahwa program NGTS yang bertujuan meningkatkan praktik gizi seimbang adalah salah satu jalan untuk menjadi sekolah yang sehat. Setelah mengikuti pelatihan NGTS, kami mulai mengembangkan strategi berjudul SING APIK (bahasa Jawa yang artinya YANG BAIK dengan akronim - Sinergis, Aplikasi, Inovatif, Koordinasi). Programnya diharapkan menarik, menyenangkan, melibatkan semua pihak, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Melalui strategi ini, kami melaksanakan beberapa kegiatan yang mengantarkan kami memenangkan Kompetisi Sekolah Sehat 2019 di Kota dan Tingkat Provinsi. Untuk membuat anggota sekolah tetap bersemangat, kami berencana untuk melaksanakan dua program inovatif, yaitu, bimbingan teman sebaya dan literasi gizi menggunakan pendekatan alam. Sekelompok siswa terlatih akan mendidik rekan-rekan mereka tentang materi gizi setiap hari Sabtu. Selain itu, siswa akan belajar tentang gizi dengan belajar langsung menanam, memanen, dan memasak menjadi makanan bergizi. Namun, program ini akan ditunda sampai siswa kembali ke sekolah segera setelah pandemi berakhir.

Gizi itu penting dalam membentuk karakter anak. Untuk itu, kami menantikan panduan lebih lanjut dari (SEAMEO) RECFON. Lebih baik lagi, jika ada mitra akademisi RECFON di Sambas bisa lebih sering mengunjungi sekolah kami untuk membina dan memantau pencapaian program. Kami juga berharap dapat berkolaborasi dengan mitra RECFON lainnya dalam meningkatkan gizi anak usia sekolah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Ingin tahu lebih lengkap bagaimana guru-guru di berbagai daerah di Indonesia melaksanakan pendidikan gizi di sekolah? Saksikan cerita mereka di kanal Youtube SEAMEO RECFON: bit.ly/NGTSolution atau scan QR Code di samping











Program 2021 dan Capaian 2020

Teruskan Kebijakan Merdeka Belajar, Menuju Kualitas SDM Unggul

2020 telah dilalui. Meski penuh tantangan akibat pandemi Covid-19, namun sejumlah kebijakan untuk mendorong pencapaian kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul terus dilakukan. Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2021 sebesar Rp 81,5 triliun juga tetap akan berfokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden: meningkatkan kualitas SDM.

EJUMLAH CAPAIAN hingga akhir 2020 berhasil dilakukan oleh Kemendikbud. Setidaknya ada enam kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan guna mendorong kemerdekaan belajar bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan itu mulai dari Merdeka Belajar Episode 1, Episode 2, Episode 3, Episode 4, Episode 5, dan Episode 6. Ada pula sejumlah program lainnya yang dikerjakan untuk mendukung pembangunan dan penguatan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Tahun 2021, kebijakan Merdeka Belajar juga akan terus dilanjutkan. Melalui Merdeka Belajar, Kemendikbud akan menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh para pemangku kepentingan pendidikan di antaranya siswa, guru, keluarga, institusi pendidikan, dunia usaha dan industri, serta masyarakat. Tiga slogan utama yang akan selalu didengungkan kepada masyarakat adalah "Sekolahkan Anak Indonesia", "Dorong Pembelajaran Siswa", dan "Tidak Ada Anak yang Tertinggal".

Melalui slogan "Sekolahkan Anak Indonesia", angka partisipasi anak bersekolah akan dicapai lebih tinggi, yaitu lebih dari 95 persen di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta lebih dari 70 persen pada jenjang pendidikan tinggi. Sementara itu, slogan "Dorong Pembelajaran Siswa" akan menciptakan hasil belajar yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, serta hasil penelitian berkualitas tinggi dengan lebih dari 90 persen tingkat penempatan kerja. Kemudian, untuk slogan "Tidak Ada Anak yang Tertinggal", Kemendikbud berharap pendidikan akan terdistribusi secara merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Hal tersebut dapat tercapai melalui perbaikan-perbaikan pada empat kelompok besar, yaitu infrastruktur dan teknologi; kebijakan, prosedur, dan pendaan; kepemimpinan, masyarakat, dan budaya; serta kurikulu, pedagogi, dan asesmen. Pada kelompok pertama, diperlukan suatu platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi dan pembangunan infrastruktur sekolah dan ruang kelas "masa depan".

Pada kelompok kedua, diperlukan kontribusi antara pemerintah dengan pihak swasta karena pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh pihak, tidak hanya Kemendikbud.
Perbaikan juga akan dilakukan dalam pelaksanaan mekanisme akreditasi, otonomi satuan pendidikan, dan pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel.

Perbaikan pada kelompok ketiga dilakukan dengan melanjutkan



POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN **TAHUN 2021** Kemendikbud **Rp81,5 T** atau **14,8%** Pengeluaran Pembiayaan Kemenag Rp66,4 T Rp55,8 T atau 12,1% 10,2% Anggaran K/L Lainnya Pendidikan **Total APBN** Rp23,1 T 20% Rp550,0 T Rp2.750,02 T atau 4,2% Transfer Daerah Rp299,1 T atau BA BUN 54,4% Rp24,01 T atau

peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah. Tidak kalah pentingnya juga meningkatkan kolaborasi dan pembinaan, secara lokal maupun global, antara guru, satuan pendidikan, dan dunia usaha-dunia industri. Perbaikan pada kelompok keempat adalah pada kurikulum dan asesmen nasional.

Transfer Daerah

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran pendidikan yang dialokasikan sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besarnya disalurkan untuk transfer daerah. Ada sebanyak 54,4 persen atau Rp299,1 triliun dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rinciannya, DAU sebanyak Rp156,58 triliun, DAK fisik

(Rp18,33 triliun), DAK nonfisik (Rp116,79 triliun), DAK otonomi khusus (Rp5,99 triliun), dan Dana Intensif Daerah (Rp1,35 triliun). Adapun penggunaan DAK nonfisik di antaranya untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD, BOP kesetaraan, BOP museum dan taman budaya, serta tunjangan profesi guru.

4.4%

Sementara itu, Kemendikbud sendiri menerima sebanyak 14,8 persen anggaran pendidikan yang sebagian besarnya digunakan untuk pendanaan wajib, berupa Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru non-PNS, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), BOPTN vokasi, serta pengembangan budaya. (RAN/DLA)

Melalui Merdeka Belajar, Kemendikbud akan menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh para pemangku kepentingan pendidikan di antaranya siswa, guru, keluarga, institusi pendidikan, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.

Sasaran Program Prioritas 2021

Berfokus pada Pembiayaan dan Pembinaan Pendidikan

Setelah meluncurkan enam kebijakan Merdeka Belajar hingga akhir 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melanjutkan kebijakan itu pada 2021. Transformasi pendidikan lewat Merdeka Belajar dilanjutkan untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan hasil pembelajaran yang berkualitas serta memeroleh pemerataan terhadap akses pembelajaran yang berkualitas itu.

RIORITAS MERDEKA Belajar 2021 akan berfokus pada pembiayaan pendidikan di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan target 1.095 juta mahasiswa, KIP Sekolah dengan target 17,9 juta siswa, layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan dengan target 42.896 sekolah, tunjangan profesi guru dengan target 363 ribu guru, serta pembinaan SILN dan bantuan pemerintah kepada 13 SILN dan 2.236 lembaga.

Fokus selanjutnya pada Merdeka Belajar 2021 adalah Program Digitalisasi Sekolah dan Medium Pembelajaran melalui empat sistem penguatan platform digital; delapan layanan terpadu Kemendikbud, Kehumasan dan Media; 345 model bahan ajar dan model media pendidikan digital; serta penyediaan sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah.

Prioritas selanjutnya adalah pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Prioritas ini akan diciptakan melalui tiga layanan pendampingan advokasi dan sosialisasi penguatan karakter, pembinaan peserta didik oleh 345 pemerintah daerah, serta peningkatan prestasi dan manajemen talenta kepada 13.505 pelajar.

Berikutnya, yang tidak kalah penting adalah program sekolah penggerak dan guru penggerak. Secara umum Mendikbud menggambarkan bahwa program Sekolah Penggerak bertujuan untuk menciptakan hasil belajar di atas level dari yang diharapkan dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan.

Untuk tahun 2021, Kemendikbud juga memprogramkan pendidikan guru penggerak untuk 19.624 orang. Sertifikasi guru dan tenaga kependidikan akan diberikan kepada 10 ribu orang. Rekrutmen bagi guru P3K termasuk formasi CPNS tetap ada serta penjaminan mutu dan sekolah penggerak akan melibatkan 548 pemda. Kemudian, untuk organisasi penggerak rencananya akan melibatkan 20.438 orang guru.

Berikutnya, yang tidak kalah penting adalah program sekolah penggerak dan guru penggerak. Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk menciptakan hasil belajar di atas level dari yang diharapkan dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, akan

Prioritas Merdeka Belajar 2021 berfokus pada pembiayaan pendidikan di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Kuliah, KIP Sekolah, layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan, tunjangan profesi guru, serta pembinaan dan bantuan pemerintah kepada SILN dan lembaga pendidikan lainnya.

tercipta perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan.

Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh tahap untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu tiga tahun ajaran. Harapannya ke depan, semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. "Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM," tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, saat menggelar peluncuran kebijakan Merdeka Belajar Episode 6 awal Februari 2021.

Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu 1) pendampingan konsultatif dan asimetris, 2) penguatan SDM sekolah, 3) pembelajaran dengan paradigma baru, 4) perencanaan berbasis data, dan 5) digitalisasi sekolah.

Dengan pendampingan konsultatif dan asimetris, Kemendikbud melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan program Sekolah Penggerak. Kemudian, masing-masing UPT di provinsi akan memberikan pendampingan kepada pemda selama implementasi program. Seperti memfasilitasi pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga mencarikan solusi jika terjadi kendala di lapangan.

Program Sekolah Penggerak adalah program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak. Tahap selanjutnya yaitu melakukan penguatan terhadap SDM sekolah yang melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Bentuk penguatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Berikutnya adalah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru yakni merancang pembelajaran berdasarkan prinsip yang







Pendidikan
Guru Penggerak

19.624 orang

Rekrutmen
Guru P3K
(termasuk Formasi
CPNS tetap ada)

548 Pemda

Sekolah Penggerak
& Guru Penggerak

Curu Penggerak

Curu Penggerak

Curu Penggerak

Curu Penggerak

Curu Penggerak

Curu Penggerak

10.000 orang

terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Sementara untuk perencanaan berbasis data, program ini menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah yang dilakukan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. Kemendikbud yang memiliki laporan potret mutu pendidikan di sekolah dapat menjadi bahan refleksi diri untuk menyesuaikan tahap perencanaan, program, dan perbaikan, sehingga menjadi siklus yang produktif. Sekolah-sekolah dengan tingkat numerasi dan literasi tertinggi di negara-negara maju, juga melakukan refleksi ini secara otomatis di tiap kelas.

Tahap akhir, digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital yang mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi melalui pendekatan yang disesuaikan. "Dengan Sekolah Penggerak, pembelajaran akan lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman," tutup Mendikbud.

Untuk tahun 2021, Kemendikbud memrogramkan pendidikan guru penggerak untuk 19.624 orang. Sertifikasi guru dan tenaga kependidikan akan diberikan kepada 10 ribu orang. Rekrutmen bagi guru P3K termasuk formasi CPNS tetap ada serta penjaminan mutu dan sekolah penggerak akan melibatkan 548 pemda. Kemudian, untuk organisasi penggerak rencananya akan melibatkan 20.438 orang guru.

Sementara itu, kuota yang tersedia bagi peserta program Guru Penggerak angkatan ketiga yaitu sebanyak 2.800 untuk calon Guru Penggerak dan 560 untuk calon pengajar praktik. Informasi tersebut dapat diakses melalui laman Program Guru Penggerak: https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/.

Pada tahap pertama, seleksi calon Guru Penggerak angkatan ketiga dilaksanakan pada 18 Januari s.d. 15 Maret 2021. Pada tahap ini, peserta wajib melakukan pengisian biodata, pengisian esai, mengunggah dokumen dan mengikuti tes bakat skolastik. Kemudian, pada tahap kedua, yaitu tanggal 31 Mei s.d 10 Juli 2021 dilakukan seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Pengumuman hasil seleksi calon Guru Penggerak angkatan ketiga disampaikan pada 13 Agustus 2021.

Sementara itu, untuk jadwal seleksi calon Pengajar Praktik (Pendamping) Pendidikan Guru Penggerak dibuka pada 18 Januari s.d 15 Maret 2021. Penilaian seleksi tahap pertama dilakukan pada tanggal 30 Maret s.d 16 April 2021, setelah semua dokumen yang diunggah oleh peserta dilakukan verifikasi dan validasi.

Selanjutnya, seleksi tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Mei - 11 Juni 2021 yang terdiri atas simulasi mengajar dan wawancara. Sebelum ditetapkan menjadi pengajar praktik, peserta mendapat pembekalan fasilitasi dan pendampingan pendidikan guru penggerak terlebih dahulu.

Guru Penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia, diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi Pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. (DLA)

Sasaran Program Prioritas 2021

Peningkatan Kualitas Program hingga Pemajuan Kebudayaan dan Bahasa

Selain berfokus pada pembiayaan dan pembinan pendidikan, sasaran program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2021 adalah pada peningkatan kualitas program hingga pemajuan budaya dan bahasa. Peningkatan kualitas program itu dilakukan untuk kurikulum dan asesmen nasional, juga melanjutkan revitalisasi pendidikan vokasi, dan kampus merdeka.

ALAH SATU kebijakan baru yang akan mulai dilakukan pada 2021 adalah asesmen nasional. Asesmen ini akan meliputi tiga hal, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen 2021 dilakukan sebagai pemetaan awal atau base line kualitas pendidikan di Indonesia. Hal yang tidak kalah penting juga peningkatan kualitas kurikulum.

Untuk itu, dalam peningkatan kurikulum dan asesmen nasional ini, Kemendikbud akan melakukan pelatihan kurikulum baru kepada 62.948 guru dan tenaga kependidikan, pendampingan dan sosialisasi implementasi kurikulum dan asesmen di 428.957 sekolah, mengembangkan 4.515 model kurikulum dan perbukuan, dan akreditasi dan standar nasional pendidikan di 94.912 lembaga. Dalam revitalisasi pendidikan vokasi,

> Kemendikud akan merevitalisasi 900 SMK yang berbasis industri 4.0, akan melakukan dukungan dan percepatan link and match dan kemitraan dengan 5.690 orang dan 250 dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dukungan pencapaian indeks kinerja utama pada 47 Perguruan Tinggi Negeri Vokasi, akan melakukan pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan kewirausahaan kepada 66.676 orang, penguatan pendidikan tinggi vokasi pada 200 program studi, sertifikasi kompetensi kepada 300 orang dosen, penguatan

pendidikan PNBP/BLU kepada 75

prasarana di delapan perguruan tinggi.

perguruan tinggi, dan penguatan sarana

REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI

Penguatan SMK Revitasi SMK (CoE), SMK Berbasis Industri 4.0 (Major Project)

900 SMK

Kemitraan

dengan DUDI

5.690 Orang,

250 DUDI

Penguatan PT Vokasi dan Profesi

- Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (200 Prodi)
- · Sertifikasi Kompetensi (Dosen 300 Dosen)
- Penguatan Pendidikan PNBP/BLU (75 PT, Rp .742,62 M)
- Penguatan Sarpas SBSN 8 PT Rp.596,358 M

Dukungan dan Percepatan Link Dukungan and Match dan Pencapaian

06

(BOPTN) 47 PTN

IKU PTN

Vokasi

Program Kursus dan Pelatihan

> Pendidikan Kecakapan Kerja, Pendidikan . Kecakapan Kewirausahaan 66.676 Orang

KAMPUS MERDEKA

Dukungan Pencapaian IKU PTN Vokasi (BOPTN)

75 PTN

Competitive Fund & Matching Fund PTN/PTS

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

21.404 Orang

02 Peningkatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi

- Melalui PNBP/BLU 75 PTN
- · Layanan Sarpas PHLN 15
- Layanan Sarpas SBSN 11 PTN
- Tracer Study 500.000 Orang
- SBMPTN/SNMPTN

Peningkatan Kualitas Pembelajaran & Kemahasiswaan

- 50 ribu Mahasiswa Berwirausaha
- 400 ribu Mahasiswa Kampus Merdeka
- 600 Prodi Inovasi Pembelajaran Digital

Pengembangan Kelembagaan PT KNB 528 Orang, WCU 13 PT

Kemendikbud mendukung sepenuhnya pencapaian indeks kinerja utama (IKU) bagi 75 PTN (BOPTN), peningkatan kelembagaan pendidikan tinggi, competitive fund dan matching fun bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan.

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN BAHASA



Prioritas yang tak kalah pentingnya adalah Kampus Merdeka. Kemendikbud mendukung sepenuhnya pencapaian indeks kinerja utama (IKU) bagi 75 PTN (BOPTN), peningkatan kelembagaan pendidikan tinggi, competitive fund dan matching fun bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan sehingga tercipta 50 ribu mahasiswa berwirausaha 400 ribu mahasisa Kampus Merdeka, 660 program studi terkait inovasi pembelajaran digital, serta pengembangan kelembagaan perguruan tinggi.

Selanjutnya yang terakhir, dalam pemajuan kebudayaan dan bahasa, Kemendikbud akan memberikan apresiasi dan peningkatan SDM kepada 5.225 orang di 994 satuan pendidikan, mengadakan kegiatan dan program publik dengan sasaran 619.515 orang, 450 layanan, 352 kegiatan dan satu platform holistik, pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda pada 72.305 unit, penguatan desa dan fasilitas bidang kebudayaan kepada 359 desa dan 260 kelompok masyarakat, serta layanan kepercayaan dan masyarakat adat kepada 1.031 orang di 25 wilayah adat.

Selain itu, Kemendikbud menyasar pembinaan bahasa dan sastra bagi 4.117 penutur bahasa, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra bagi 200 lembaga, dan pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di daerah bagi 21.132 penutur bahasa

Prioritas pada pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan apresiasi dan peningkatan SDM dan lembaga kebudayaan pada 5.225 orang di 994 satuan pendidikan, penguatan desa dan fasilitasi bidang kebudayaan pada 350 desa dan 250 kelompok masyarakat, serta pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda pada 72.305 unit. Ada pula penyelenggaraan event dan program publik yang melibatkan lebih dari 600 ribu orang, 450 layanan, 352 kegiatan, dan satu platform. (RAN)

Reformasi Sistem Pendidikan di Sepanjang 2020

Merdeka Belajar dalam Enam Episode Kebijakan

Kebijakan Merdeka Belajar pertama kali diluncurkan pada Desember 2019. Kala itu, ada empat kebijakan yang menjadi fokus di episode pertama ini. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyusun berbagai kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang dikemas dalam kelompok yang sesuai.

INGGA AKHIR 2020, sebanyak enam episode Merdeka Belajar telah dirumuskan. Keenam episode tersebut diluncurkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Berikut kilas balik perjalanan setiap episode kebijakan Merdeka Belajar.

Merdeka Belajar Episode Pertama

Episode pertama Merdeka Belajar diluncurkan pada 11 Desember 2019.
Ada empat kebijakan yang diumumkan saat itu, yaitu tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Empat pokok program kebijakan tersebut menjadi arah pembelajaran sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Episode Kedua: Kampus Merdeka

Tak lama setelah meluncurkan empat pokok kebijakan di Merdeka Belajar pertama, tepat pada 24 Januari 2020, episode kedua diluncurkan. Kali ini tema besar yang diusung adalah Kampus Merdeka. Di dalamnya terdapat empat pokok kebijakan terkait pendidikan tinggi.

Pertama, tentang otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Kerja sama mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.

Kedua, program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Dengan mekanisme ini, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

Ketiga, terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Dalam hal ini, Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Dan yang keempat, perguruan tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester (sks).

Empat kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. Kebijakan ini juga menjadi tahap awal untuk melepaskan belenggu dunia pendidikan tinggi agar lebih mudah bergerak. Walaupun masih belum menyentuh aspek kualitas, namun ada beberapa matriks yang digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai target.

Episode Ketiga: Penyesuaian Dana BOS

Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 10 Februari 2020 dalam peluncuran Merdeka Belajar ketiga. Peluncuran yang dilakukan di Kementerian Keuangan dan berkolaborasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri ini, mendorong penggunaan dana BOS yang fleksibel. Salah satu tujuannya adalah sebagai langkah awal peningkatan kesejahteraan guru-guru honorer, dengan porsi hingga 50 persen.

Kebijakan ini didasari pada kondisi setiap sekolah yang berbeda dan menyebabkan kebutuhan di tiap sekolah juga berbeda-beda. Dengan perubahan ini, pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS. Namun demikian, penyesuaian juga diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Selain kebijakan penyaluran dan penggunaan, pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp100.000 per peserta didik. Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900 ribu per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 per siswa per tahun.

Dengan penyesuaian ini, diharapkan laporan pemakaian dana BOS mampu menggambarkan keadaan penggunaan BOS yang riil dan seutuhnya. Selain itu, sekolah juga wajib memublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

Episode Keempat: Organisasi Penggerak

Program Organisasi Penggerak (POP) diluncurkan pada 10 Maret 2020. Kebijakan ini muncul dengan kesadaran bahwa selama ini begitu banyak organisasi masyarakat yang peduli terhadap mutu pendidikan namun tumbuh dan bergerak sendirisendiri. Banyak dari organisasi masyarakat yang sukarela membiayai berbagai inisiasi di bidang pendidikan tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Organisasi Penggerak diharapkan menjadi salah satu elemen penting terciptanya Sekolah Penggerak, tempat menuangkan seluruh konsep

MERDEKA BELAJAR Episode #1 Menghapus Ujian Penyederhanaan Penggantia<u>n</u> Peraturan Penerimaan Sekolah Berstandar Peserta Didik Baru (PPDB) ŪN RPP Guru Nasional (USBN) Episode #2 Pembukaan Hak belajar Sistem akreditasi Perguruan Tinggi tiga semester di luar program perguruan tinggi Negeri Badan Hukum studi baru program studi Penggunaan BOS Episode #3 **Penyaluran BOS** Pelaporan BOS Nilai satuan BOS lebih fleksibel lebih transparan langsung ke meningkat rekening sekolah untuk sekolah dan akuntabel Episode #4 Episode #5 Episode #6 Transformasi Organisasi dana pemerintah Penggerak untuk Perguruan Tinggi

TRANSFORMASI PENDIDIKAN INDONESIA DIMULAI DARI

Kondisi setiap sekolah yang berbeda menyebabkan kebutuhan di tiap sekolah juga berbeda-beda. Dengan perubahan ini, pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas bagi sekolah dalam mengunakan dana BOS.

Merdeka Belajar. Saat peluncuran, tercatat sudah 3.300 organisasi dan 12.159 relawan yang mendaftar pada laman sekolah.penggerak. kemdikbud.go.id. Namun dalam perjalanannya, kebijakan POP mendapat sorotan publik dengan mundurnya tiga organisasi besar dari program ini. Dengan kondisi tersebut, Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan program organisasi penggerak dan melakukan evaluasi menyeluruh.

Episode Kelima: Guru Penggerak

Merdeka Belajar Guru Penggerak diluncurkan secara virtual pada 3 Juli 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan Guru Penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia yang dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik. Ujungnya, diharapkan siswa dapat menjadi pelajar yang memiliki karakter Pelajar Pancasila.

Arah program Guru Penggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik. Sedangkan pelatihan yang didapatkan para guru, menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh.

Terdapat tiga modul pelatihan dalam Guru Penggerak. Pertama, Paradigma dan Visi Guru Penggerak, dengan materi refleksi filosofi pendidikan Indonesia – Ki Hadjar Dewantara, nilainilai dan visi Guru Penggerak, dan membangun budaya positif di sekolah. Kedua, Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan pelatihan (coaching).

Ketiga, Kepemimpinan Pembelajaran dalam Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah, berisi materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Guru Penggerak diharapkan mampu mendorong transformasi pendidikan Indonesia dan mendorong peningkatan prestasi akademik murid, serta

mengajar dengan kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif, sehingga guru bisa berperan lebih dari peran guru saat ini.

Episode Keenam: Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi

Merdeka Belajar Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual pada 3 November 2020. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mendukung visi Presiden untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Dengan transformasi ini, pendidikan tinggi diharapkan mampu mencetak lebih banyak lagi talenta-talenta yang mampu bersaing di tingkat dunia.

Transformasi ini juga fokus pada pengembangan perguruan tinggi bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Melihat sisi pendanaan per mahasiswa Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, maka pada kebijakan ini ada peningkatan anggaran dalam konteks kinerja untuk mencapai mutu yang diinginkan. Dana pemerintah untuk pendidikan tinggi berada pada angka Rp2,9 triliun di 2020 dan akan ditingkatkan sebanyak 70% pada 2021 menjadi Rp4,95 triliun.

Merdeka Belajar Episode Keenam mencakup tiga terobosan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia, yaitu 1). insentif berdasarkan capaian indikator kinerja utama untuk PTN, 2). dana penyeimbang atau matching fund untuk kerja sama dengan mitra untuk PTN dan PTS, dan 3). program kompetisi Kampus Merdeka atau competitive fund untuk PTN dan PTS. (ALN)



Capaian Program Prioritas Tahun 2020

Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan karena pandemi Covid-19. Dunia pendidikan dan kebudayaan pun ikut terdampak. Banyak kebijakan baru yang dikeluarkan Kemendikbud sepanjang tahun 2020 untuk menghadapi tantangan di tengah pandemi Covid-19.

I BIDANG pendidikan, metode belajar mengajar berubah menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Siswa, guru, dosen, hingga mahasiswa, berjuang untuk tetap bisa menjalankan aktivitas pembelajaran dengan segala keterbatasan. Di bidang kebudayaan, kegiatan seni dan budaya sempat lumpuh. Optimalisasi media digital dan pertunjukan virtual menjadi solusinya.

Salah satu tantangan yang dihadapi Kemendikbud di tengah pandemi Covid-19 adalah berupaya untuk tetap menjaga kualitas pembelajaran dan memajukan kebudayaan. Dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan, prinsip dasar yang menjadi pegangan adalah mengupayakan yang terbaik untuk generasi bangsa dan para pendidik.

Di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), Kemendikbud melakukan penyesuaian terhadap kebijakan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Perubahan petunjuk teknis BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan diatur melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020.

Kebijakan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kemendikbud melakukan penyesuaian juknis penggunaan BOS Reguler yang diatur melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Dalam penyesuaian kebijakan tersebut, Kemendikbud memperbolehkan satuan pendidikan menggunakan dana BOS dan BOP untuk pembelian pulsa/paket data internet bagi pendidik dan peserta didik.

Selain itu, dana BOS dan BOP juga dapat digunakan untuk pembiayaan layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Kemudian untuk pertama kalinya, Kemendikbud memberikan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk sekolah swasta yang rentan tutup karena kondisi finansialnya terdampak pandemi Covid-19. Ketentuan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja.

Berdasarkan peraturan tersebut, dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja akan diberikan untuk tiap sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB yang memenuhi kriteria, yaitu sebesar Rp60 juta per tahun. Dana akan disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Sebelumnya, kedua jenis BOS itu diperuntukkan hanya bagi sekolah negeri dengan kualifikasi berada di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dan memiliki riwayat kinerja yang baik.

Capaian Merdeka Belajar

Secara umum, program-program prioritas Merdeka Belajar untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Beberapa capaiannya antara lain peningkatan kualitas pembelajaran PAUD pada 8.309 lembaga PAUD; renovasi sekolah pada 153 sekolah; pembangunan unit sekolah baru (USB) sebanyak sembilan sekolah; bantuan sekolah inklusi untuk 500 sekolah; dan bantuan siswa pendidikan khusus untuk 154.481 siswa.

Terkait dengan guru dan tenaga kependidikan, pandemi Covid-19 telah menguatkan transformasi pendidikan dengan terbentuk sebuah kebiasaan baru bagi guru dalam memberikan pelajaran kepada peserta didiknya. Di lingkungan komunitas guru, terbentuk sebuah budaya belajar, berbagi, dan berkolaborasi.

Guru-guru juga semakin terbiasa dan berani dalam menggunakan platform teknologi dalam belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Sementara untuk capaian program prioritas Merdeka Belajar dari

Direktorat Jenderal Guru dan

antara lain Peningkatan Kompetensi untuk Guru dan Kepala Sekolah dengan realisasi 40.241 orang; Program Sertifikasi Guru dengan realisasi 33.873; dan Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di 34 Provinsi.

Di bidang pendidikan vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit kerja baru juga menunjukkan beberapa capaiannya dalam menjalankan program prioritas Merdeka Belajar di tahun 2020. Capaian tersebut antara lain Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan realisasi 491 sekolah; Bantuan Program Kecakapan Kerja dengan realisasi 53.709; Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan realisasi 97 perusahaan/Lembaga; Bantuan Program Kecakapan Wirausaha untuk 16.676 siswa; dan Sertifikasi Siswa SMK untuk 138.200 orang.

Pada jenjang pendidikan tinggi, adaptasi aspek penelitian dan pengabdian masyarakat terjadi dengan pesat di tahun 2020. Terdapat lebih dari 1.600 invensi dan inovasi yang lahir dari perguruan tinggi selama masa pandemi Covid-19. Pengabdian masyarakat juga tidak pernah surut meski di tengah pandemi melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilakukan banyak kampus. Ada pula belasan ribu mahasiswa bidang kesehatan yang bergerak membantu pemerintah daerah dan masyarakat menangani Covid-19 melalui program Relawan Covid-19 Nasional (RECON).

Solusi Kendala Finansial

Pembelajaran di perguruan tinggi juga tetap berjalan dengan segala keterbatasan. Salah satu bantuan finansial yang dilakukan Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

adalah keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
bagi mahasiswa yang terkendala masalah
ekonomi. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor
25 Tahun 2020, Kemendikbud memberikan
berbagai skema dukungan bagi mahasiswa
perguruan tinggi negeri (PTN) terdampak
pandemi. Mahasiswa yang menghadapi
kendala finansial selama pandemi Covid-19

dapat mengajukan keringanan UKT kepada perguruan tinggi. Terdapat lebih dari 430 ribu mahasiswa yang telah mendapat keringanan UKT.



Kemendikbud juga meluncurkan program pendanaan berbasis sinergi antara perguruan tinggi dengan dunia industri, melalui matching fund atau pendanaan dana pendamping bagi industri yang akan memanfaatkan inovasi dari perguruan tinggi. Matching fund tersebut dapat diikuti seluruh insan pendidikan tinggi, baik dosen dan mahasiswa melalui platform Kedaireka. Kedaireka merupakan platform yang mempertemukan perguruan tinggi dengan industri, yaitu para pereka cipta/ilmuwan/akademisi dengan pelaku dunia usaha/industry untuk melahirkan inovasi yang akan menjadi solusi bagi Indonesia.

Di bidang penelitian dan pengembangan, salah satu capaiannya adalah terdapat lebih dari 5.000 satuan pendidikan yang berhasil diakreditasi. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan melakukan perubahan mendasar dalam menjalankan prinsip dasar akreditasi, baik dari proses akreditasi, termasuk instrumen yang digunakan.

Sebelumnya, akreditasi sekadar mengedepankan ketaatan pada administrasi sehingga keluaran (output) akreditasi menjadi kurang bermakna, yaitu dalam melihat apakah sebuah sekolah berkinerja baik atau tidak. Di balik angka 5.000 satuan pendidikan yang telah diakreditasi pada tahun 2020 terdapat proses penyusunan instrumen yang luar biasa dan sarat dengan pemikiran, melalui sebuah proses pelaksanaan terbatas yang menguji instrumen. Ke depan, proses akreditasi diharapkan dapat lebih efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang lain, seperti dapodik, laporan masyarakat, atau sumber lain yang kemudian bisa dianalisis dan dapat digunakan untuk menetapkan akreditasi.

Balitbang dan Perbukuan juga melakukan pengembangan kurikulum, termasuk kurikulum darurat dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui penyederhanaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Penyederhanaan kurikulum ini membantu guru dan siswa untuk bisa lebih belajar hal-hal yang paling esensial.

Kemendikbud juga mengembangkan dokumen yang memudahkan guru untuk memahami capaian standar kompetensi lulusan (SKL). Dokumen yang disebut capaian pembelajaran itu merupakan pemaknaan dari dokumen lain yang telah ada. Dokumen capaian belajar ini diharapkan bisa lebih menunjang kebijakan Merdeka Belajar.

Capaian lain dari Balitbang dan Perbukuan adalah ujian berbasis komputer atau computer based test (CBT) yang telah dilaksanakan di 139.694 satuan pendidikan. Di balik itu angka tersebut terdapat proses penulisan soal-soal ujian untuk pelaksanaan asesmen nasional tahun depan dan penyusunan perangkat lunak (software) serta aplikasi untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimum (AKM).

Angka 139 ribu satuan pendidikan yang menjalankan CBT tersebut menggambarkan sebuah proses simulasi skala besar yang digunakan Kemendikbud untuk menguji sistem aplikasi maupun untuk melihat secara empiris beberapa contoh soal yang disusun untuk melihat tingkat kesulitannya. Diharapkan saat pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021, semua aspek sudah melalui pretest, baik untuk sistem aplikasi dan jaringan, termasuk soal-soal untuk AKM juga sudah mendapatkan pretest di lapangan. Di tahun 2020 juga Kemendikbud sudah melakukan langkah-langkah persiapan asesmen nasional 2021, antara lain penyiapan proktor dan pengawas ujian.

Konsolidasi dan Transformasi

Di bidang kebudayaan, hampir semua program prioritas di tahun 2020 melampaui target. Ada dua kata kunci penting selama tahun 2020 dalam memajukan kebudayaan, yaitu konsolidasi dan transformasi. Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan konsolidasi dari semua elemen dan pemangku kepentingan yang ada di dalam ekosistem kebudayaan, terutama pelaku budaya yang ada di lapangan.

Sementara transformasi dilakukan Ditjen Kebudayaan di dalam pengelolaan kekayaan budaya dan dalam cara menghadirkan kekayaan budaya kepada masyarakat. Dalam transformasi ini peran media digital menjadi sangat penting. Jumlah pertunjukan/kegiatan (event) kebudayaan justru bertambah, dari target 151 kegiatan menjadi 175 dalam realisasinya. Hal tersebut didukung dengan penggunaan media digital secara optimal melalui pertunjukan seni budaya yang berlangsung secara daring.

Khusus untuk cagar budaya, Kemendikbud berhasil melestarikan 4.822 cagar budaya dari target 4.011. Fakta ini menjadi salah satu hikmah yang bisa diambil dari pandemi Covid-19 karena memberikan kesempatan pada cagar budaya untuk beristirahat sejenak akibat berkurangnya kunjungan



pengunjung. Hal ini membuat petugas di lapangan bisa menangani pelestarian cagar budaya secara lebih efektif.

Program Apresiasi Masyarakat terhadap Galeri, Museum, dan Cagar Budaya bahkan mencapai angka yang jauh melebihi target, yakni dari target 500 ribu orang, berhasil mencapai realisasi lebih dari 1 juta orang. Peningkatan apresiasi ini juga terkait dengan penggunaan teknologi digital karena Ditjen Kebudayaan secara rutin menghitung akses yang dilakukan masyarakat melalui platform budaya daring.

Program prioritas lain di bidang kebudayaan adalah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mencapai realisasi 30 desa; Apresiasi untuk SDM dan Lembaga Kebudayaan yang mencapai realisasi 63.470; dan Pendaftaran, Penetapan, dan Pelindungan Warisan Budaya yang mencapai realisasi 458 warisan budaya.

Pada bidang bahasa, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah meluncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M dalam 77 Bahasa Daerah. Program Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) berhasil menugaskan 220 orang sebagai pengajar BIPA di berbagai negara melalui pembelajaran jarak jauh/daring. Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang dikomandoi Badan Bahasa Kemendikbud juga mencapai realisasi sesuai target, antara lain terdapat 420 orang yang masuk dalam program GLN Generasi Muda Pengapresiasi.

Sementara capaian program di Sekretariat Jenderal salah satunya adalah realisasi anggaran Kemendikbud Tahun Anggaran 2020 yang mencapai 91,31 persen. Angka ini melebihi rata-rata nasional di angka 90,00 persen. Dari total pagu Rp83 triliun, realisasi anggaran Kemendikbud mencapai Rp76 triliun

Realisasi tersebut sudah dikurangi sisa bantuan kuota internet sebesar Rp2,9 triliun. Program prioritas Merdeka Belajar tahun 2020 dari Setjen Kemendikbud yaitu Program Pembiayaan Pendidikan; Program Penguatan Karakter dan Peningkatan Prestasi; Program Transformasi Digital dan Bantuan TIK; dan Pemangkasan Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.

Semua pelaksanaan program prioritas tersebut berada di bawah pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen). Dalam upaya penegakan integritas dan pengawasan terkait pelaksanaan fungsi Kemendikbud, khususnya pada pelaksanaan program prioritas Merdeka Belajar, Itjen Kemendikbud melakukan proses investigasi yang berdasarkan laporan maupun penemuan. Upaya pencegahan terus dilakukan Itjen dalam bentuk kegiatan audit pemeriksaan guna melakukan pemantauan dan pengawalan, di antaranya pada dana transfer daerah dan program prioritas Kementerian.

Langkah yang dilakukan antara lain dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan (LK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Pengendalian Intern dan Pelaporan Keuangan (PIPK), Rancangan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang direncanakan sudah sesuai dengan fungsi unit kerja dan tepat sasaran. Tujuan pengawasan dalam bentuk pencegahan ini adalah untuk mengurangi adanya pemborosan dan mencegah adanya peluang oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan yang ada. Tidak hanya fokus pada pengawasan dan pemantauan, Itjen Kemdikbud juga memberikan fasilitasi dalam bentuk program pencegahan korupsi. (DES)

Pandemi Covid-19 telah menguatkan transformasi pendidikan dengan terbentuk sebuah kebiasaan baru bagi guru dalam memberikan pelajaran kepada peserta didiknya. Di lingkungan komunitas guru, terbentuk sebuah budaya belajar, berbagi, dan berkolaborasi.

Relaksasi Kebijakan Selama Pandemi

Ringankan Beban bagi Mereka yang Terdampak

Pandemi Covid-19 menggerus hampir semua lini kehidupan, tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menyesuaikan kebijakan dengan cepat dan tepat. Penyesuaian kebijakan itu dilakukan untuk Bantuan Operasional Sekolah, Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan kurikulum kondisi darurat.

ACETNYA PEMBAYARAN sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari orang tua siswa yang terdampak pandemi berpotensi pada penutupan sekolah swasta. Padahal keberadaan sekolah swasta membantu memenuhi daya tampung sekolah negeri yang terbatas. Untuk itulah Kemendikbud turut membantu sekolah swasta sehingga keberlangsungan operasional sekolah tetap berjalan.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan memberikan BOS Kinerja dan BOS Afirmasi. Bantuan diberikan untuk membantu daerah-daerah yang paling membutuhkan dan rentan terpukul akibat pandemi. Bantuan disalurkan kepada sekolah swasta dan negeri yang memenuhi kriteria sehingga mengurangi dampak keterpurukan ekonomi akibat krisis Covid-19.

KETENTUAN BARU BOS AFIRMASI & KINERJA



Dana sebesar **Rp 60 juta per sekolah per tahun**

Untuk sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, SMK, SLB)

Dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah Kebijakan penyesuaian penggunaan dana BOS afirmasi dan kinerja didasarkan pada evaluasi bahwa selain daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), banyak daerah lain yang perekonomiannya terimbas akibat Covid-19. Misalnya beberapa daerah di perkotaan dengan taraf ekonomi rendah ikut terdampak akibat (penerapan) social distancing.

Atas evaluasi tersebut, Kemendikbud memutuskan, BOS afirmasi dan BOS kinerja difokuskan dan diprioritaskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan terdampak, termasuk di sektor pendidikan terutama sekolah swasta. Fakta di lapangan menyebut bahwa sekolah swasta menjadi institusi paling rentan terdampak krisis.

Keleluasaan Memilih Kurikulum

Selain itu, dalam menghadapi situasi khusus seperti pandemi Covid-19, Kemendikbud mengeluarkan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Dengan kebijakan tersebut, satuan pendidikan di daerah yang ditetapkan berada dalam kondisi khusus, dapat memilih salah satu dari tiga kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bantuan diberikan untuk membantu daerah-daerah yang paling membutuhkan dan rentan terpukul akibat pandemi. Bantuan disalurkan kepada sekolah swasta dan negeri yang memenuhi kriteria sehingga mengurangi dampak keterpurukan ekonomi akibat krisis Covid-19.

> Ketiga kurikulum tersebut adalah, kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan, kurikulum yang disederhanakan untuk kondisi khusus dan ditetapkan oleh Kemendikbud, atau kurikulum yang disederhanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan masingmasing.

> Implementasi kurikulum yang disederhanakan untuk kondisi khusus didasarkan pada prinsip aktif, yaitu pembelajaran yang mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam setiap proses belajar mengajar. Dalam kondisi ini, guru diharapkan dapat mempelajari bagaimana siswa dapat belajar, lalu merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh. Sekolah, sebagai media penghubung guru dan siswa juga perlu memastikan adanya relasi sehat antarpihak yang terlibat, untuk menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli, terlepas dari keragaman latar belakang peserta didik.

KEBIJAKAN KERINGANAN UKT

Mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali (misalnya: menunggu kelulusan)

Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiwa

Mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil < 6 SKS:

- Semester 9 bagi mahasiswa program sarjana & sarjana terapan (S1, D4)
 Semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D3)

UKT dan Bantuan bagi Mahasiswa

Tidak hanya pada satuan pendidikan, Kemendikbud juga menetapkan kebijakan untuk membantu mahasiswa terdampak Covid-19. Selain penyesuaian terhadap UKT, bantuan berupa dana juga diberikan bagi mahasiswa dengan kriteria tertentu.

Dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 disebutkan setidaknya empat kebijakan baru yang diatur bagi penetapan UKT pada perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud. Pertama, UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi Covid-19. Kedua, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester (SKS) sama sekali, misalnya menunggu kelulusan.

Ketiga, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/ atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa. Keempat, mahasiswa di akhir masa kuliah membayar paling tinggi 50 persen UKT jika mengambil ≤6 SKS (semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjanan terapan, semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga).

Adapun keringanan UKT yang dimaksud meliputi empat hal, yaitu, cicilan UKT, penundaan UKT, penurunan UKT, dan beasiswa. Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah atau skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi dan kriteria penerimaan sesuai ketentuan program beasiswa yang berlaku. (RAN)

Bangkit Lawan Pandemi

Hadapi Korona, Mutu Pendidikan Tetap Dijaga



Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* mengharuskan pemerintah mengambil tindakan yang tepat dan terukur, tak terkecuali aspek pendidikan dan kebudayaan hingga keuangan. Di awal Indonesia terdampak bencana nonalam tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan realokasi anggaran sebesar 405 miliar rupiah. Dua bulan kemudian, Kemendikbud pun kembali melakukan perubahan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp4,9 triliun yang semula Rp75,7 triliun menjadi Rp70,72 triliun.

BERBAGAI MACAM kegiatan pendukung dan manajemen yang tidak relevan di masa pandemi Covid-19 merupakan sumber pemotongan terbesar seperti perjalanan dinas, rapat koordinasi berskala besar, pengadaan barang dan jasa, dan lainnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyampaikan, realokasi anggaran tersebut merupakan hal yang tersulit dilakukan Kemendikbud tetapi kondisi krisis saat ini mengharuskan hal tersebut dilakukan guna mendukung penanganan bencana tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa programprogram prioritas bisa berjalan dengan efektif dan perubahan anggaran ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas pendidikan di Indonesia," jelas Mendikbud Nadiem pada rapat koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) secaratelekonferensidi Jakarta.

Bantuan Kuota Belajar

Pada September 2020, pemerintah melalui Kemendikbud pun memberikan bantuan kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen agar proses pembelajaran jarak jauh berjalan baik selama masa pandemi. Upaya menjaga kualitas pembelajaran tetap berjalan baik ini merupakan kerja sama dari kementerian dan lembaga lain serta para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan antara lain Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta operator selular.

Alokasi kuota bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 gigabyte/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 gigabyte /bulan, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan Pada September 2020, pemerintah melalui Kemendikbud pun memberikan bantuan kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen agar proses pembelajaran jarak jauh berjalan baik selama masa pandemi.

dasar dan menengah 42 gigabyte /bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 gigabyte /bulan. Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB/bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar. Bantuan ini disalurkan langsung ke nomornomor ponsel yang telah terdaftar pada data pokok pendidikan (Dapodik) dan pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) bukan dalam bentuk nomor baru atau nomor perdana.

Perbincangan seputar bantuan kuota internet pun ramai di media sosial Twitter. Kata "Kemendikbud" menjadi tren di Twitter tak lama setelah kebijakan bantuan kuota data internet diterbitkan. Pada 30 September 2020, terdapat sekitar 5.500 cuitan dan umumnya netizen mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada Kemendikbud atas kebijakan ini.

STATISTIK GURU BERBAGI



15,86
68,83
15,24
RPP Daring
RPP Luring
Kombinasi

239.847 pengguna telah bergabung

46.885 RPP telah dibagikan oleh Para Guru





7.866.389 pengguna akses web guru berbagi **62.858.235** kali web guru berbagi diakses







16.836.752 unduh RPP dan 87.765 menyukainya Aksi Kolaborasi
2.088
Artikel Bertema
Pengajaran di
masa Covid-19

4.437 Artikel Refleksi

Ringankan Beban PTK Non-PNS

Satu bulan setelah peluncuran bantuan kuota internet, pemerintah melalui Kemendikbud kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil (PTK Non-PNS). Tak tanggungtanggung, Kemendikbud menggelontorkan anggaran Rp3,6 triliun untuk BSU PTK Non-PNS tersebut. Bantuan ini disalurkan kepada 162 ribu dosen perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta, dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Menurut Mendikbud, pemerintah selalu mengutamakan kesederhanaan kriteria agar memudahkan calon penerima dalam memperoleh bantuan. Syarat PTK yang mendapat BSU adalah warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, berstatus non-PNS, dan tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Tenaga Kerja, serta bukan penerima kartu prakerja terhitung sampai 1 Oktober 2020. Program ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, salah satunya Komisi X DPR RI.

Perlindungan dan Pembinaan Pelaku Budaya

Di bidang kebudayaan pun Kemendikbud memberikan bantuan bagi 59 ribu pelaku budaya yang terdampak Covid-19 masing-masing Rp1 juta. Program yang dinamai Apresiasi Pelaku Budaya (APB) merupakan layanan perlindungan dan pembinaan pelaku budaya terdampak pandemi Covid-19 agar mampu mendorong mereka untuk menghasilkan dan mempublikasikan hasil karya mereka melalui wahana virtual.

Pendiri Institut Musik Jalanan, Andi Malewa mengatakan, bantuan seperti APB itu sangat menolong para pelaku budaya di tengah pandemi Covid-19. "Kemendikbud mendampingi para musisi jalanan sejak awal masa pandemi sampai hari ini," ujar Andi Malewa.

Capaian Bantuan Subsidi Upah Bagi PTK Non PNS Tahun 2020, Bantuan Untuk PAUD Dasmen, dan Bantuan Untuk Pelaku Seni dan Budaya di Masa Pandemi Covid-19







Selain APB, beberapa kegiatan yang diselenggarakan Kemendikbud di bidang kebudayaan meliputi fasilitasi bidang kebudayaan, kegiatan daring @budayasaya, Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) dan Film Mega Event (secara virtual), pembuatan podcast Budaya Kita, serta Digitalisasi Musik Nusantara.

Alternatif Pembelajaran Saat Covid-19

Selain itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, BSU sangat diperlukan para PTK Non-PNS. "Bantuan ini sangat penting dalam upaya mendukung proses pembelajaran agar bisa terus berjalan. Para guru bisa berkonsentrasi mengajar tanpa memikirkan asap dapur mereka," katanya.

Keterbatasan interaksi antarguru di tengah wabah Covid-19 juga mendorong Kemendikbud untuk mengajak guru, komunitas, dan penggerak pendidikan berkolaborasi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui laman Guru Berbagi (guruberbagi. kemdikbud.go.id). Dalam laman ini tersedia berbagai panduan, bacaan, dan tips sebagai referensi pembelajaran daring untuk siswa dan kegiatan belajar mengajar.

Laman Guru Berbagi bersifat dua arah, para guru dapat berbagi ide dari praktik baik dalam proses belajar mengajar. Dengan berbagi tersebut tercipta ruang interaksi, kolaborasi, dan kreatif secara bersama-sama antarpengajar di manapun berada.

Tak hanya laman Guru Berbagi, laman Rumah Belajar (belajar.kemdikbud.go.id) punmenjadialternatifsaranapembelajaran yang disajikan pemerintah secara gratis. Selama 2020 laman Rumah Belajar mengalami peningkatan pengguna baru yakni sebanyak 7,79 juta sehingga total pengguna Rumah Belajar menjadi 105,53 juta pengguna.

Laman Rumah Belajar memiliki fitur utama yakni sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan bank soal. Ada juga fitur pendukung pada Rumah Belajar yakni edugame, peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, serta karya Bahasa dan sastra.

Selain itu, Kemendikbud juga berupaya memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui bahasa yakni dengan diterbitkannya Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M dalam 77 bahasa daerah. Ada juga laman Senarai Padanan Asing Indonesia (spai. kemdikbud.go.id) yang telah berisikan padanan kata dari istilah-istilah seputar Covid-19. (ABG)

Program yang dinamai Apresiasi Pelaku Budaya (APB)

merupakan layanan perlindungan dan pembinaan
pelaku budaya terdampak pandemi Covid-19 agar
mampu mendorong mereka untuk menghasilkan dan
mempublikasikan hasil karya mereka melalui wahana virtual.

Kemendikbud Tanggap dan Responsif Hadapi Disrupsi Akibat Pandemi Covid-19



Hetifah Sjaifudian

Tidak bisa dipungkiri tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan lantaran pandemi Covid-19 telah membuat bidang pendidikan juga terkena dampaknya. Namun, menurut Hetifah Sjaifudian Kemendikbud cukup cepat tanggap menghadapi disrupsi yang terjadi dan memberikan program-program yang dibutuhkan masyarakat. Berikut petikan wawancara redaksi *Jendela* dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga pernah berkarier sebagai dosen dan peneliti.



Secara garis besar bagaimana Ibu menilai capaian kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020?

Memang capaian di tahun 2020 agak berbeda dengan apa yang kita ekspektasikan sebelumnya akibat adanya pandemi. Di tahun 2019, kita sangat bersemangat dengan banyaknya ide-ide inovasi dari Mas Menteri. Namun demikian, tanpa terduga pandemi datang dan target-target yang kita buat sebelumnya harus disesuaikan. Anggaranpun juga harus kita ikhlaskan untuk dipotong. Namun demikian, secara keseluruhan saya rasa Kemendikbud cukup cepat tanggap menghadapi disrupsi yang terjadi dan memberikan program-program yang dibutuhkan masyarakat.

Bagaimana inovasi kebijakan dan program Kemendikbud dalam merespons dampak pandemi Covid-19 terhadap aspek pendidikan?

Saya rasa sudah cukup bagus. Mas Menteri bekerja keras melobi Kemenkeu untuk menyediakan dana untuk kuota, dan juga dengan cepat menjalin kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi. Juga portal Guru Berbagi yang digarap dengan baik dan sangat bermanfaat bagi para guru menyesuaikan diri di masa yang sulit ini. Tahun 2020 karena itu merupakan shock bagi kita, Kemendikbud saya rasa sudah meletakkan dasar kebijakan program yang baik. Di tahun 2021 tinggal ditingkatkan kualitasnya. Misal, program Belajar Dari Rumah (BDR) di TVRI yang sudah ada mungkin dapat diperbanyak lagi jam belajarnya, juga kualitas materinya ditingkatkan.

Apakah kebijakan Merdeka Belajar sudah dapat diimplementasikan dengan baik?

Terdapat beberapa elemen dalam rangkaian program Merdeka Belajar yang dicanangkan Kemendikbud, antara lain terkait UN, USBN, PPDB, Kampus Merdeka, Dana BOS, dan Organisasi Penggerak. Sebagian sudah dapat terimplementasi dengan baik, sebagai contoh kuota zonasi PPDB yang dibuat lebih fleksibel, juga RPP untuk guru yang sekarang lebih sederhana. Namun demikian, dengan adanya pandemi menjadikan kita juga terdistraksi oleh halhal yang lebih mendesak untuk diselesaikan, yang berakibat pada belum terlaksananya beberapa kebijakan merdeka belajar seperti Program Organisasi Penggerak dan Asesmen Nasional. Saya harap di 2021 sudah bisa kita berfokus kembali pada kebijakan fundamental tersebut dan tentunya dengan tetap menyesuaikan dengan adanya Covid-19 dengan menggunakan skala prioritas.

Bagaimana penyelenggaraan kebijakan dan program yang terkait dengan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi?

Saya kira keseriusan pemerintah terkait hal itu terbukti dengan dibentuknya sebuah ditjen baru yaitu Ditjen Vokasi. Hal yang saya sangat apresiasi adalah upaya besar-besaran untuk me-link-kan dunia usaha dan dunia industri, yang merupakan masalah yang sudah kita alami bertahun-tahun. Mindset Mas Menteri dalam pendidikan tinggi juga saya rasa tepat, yaitu bagaimana perguruan tinggi bukan hanya mengajarkan teori, atau ibaratnya mengajarkan anak berenang di kolam renang, tapi juga harus membiasakan anak berenang di laut lepas, dengan program magang tiga semester yang digagas. Dari laporan Kemendikbud, hampir semua target di Ditjen Vokasi dan Ditjen Pendidikan Tinggi juga terealisasi 100% bahkan lebih, yang saya rasa merupakan sesuatu yang impresif.

Bagaimana perhatian terhadap aspek kebudayaan?

Saya ingat di awal masa jabatannya, yang pertama kali dilakukan Mas Menteri adalah mengumpulkan kepala dinas terkait dan pelaku budaya dari seluruh Indonesia untuk sarasehan membahas kemana arah pembangunan kebudayaan kita. Dalam pelaksanaannya, beberapa program juga telah berhasil dilaksanakan, meskipun sayang karena adanya Covid-19 beberapa rencana jadi harus dibatalkan. Saya harap ke depannya, dalam aspek budaya pemerintah dapat memiliki visi yang besar terkait pengembangan budaya Indonesia. Kita bisa benchmark dari Korea Selatan misalnya, yang bisa

memadukan budaya tradisional dengan budaya populernya, sehingga akhirnya budaya tersebut dapat diterima dan diminati anak-anak muda dari seluruh dunia. Kita harus bisa bermimpi sampai kesana

Prasyarat apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Kemendikbud agar kebijakan dan program yang telah ditentukan pada tahun 2021 dapat berjalan dengan baik dan apa tantangannya?

Adanya dialog yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan, mulai dari siswa, orangtua murid, guru, pemda, praktisi pendidikan, ormas, dan lain-lain. Agar program sukses dan menjawab kebutuhan di lapangan, kolaborasi dan sinergi serta perencanaan yang partisipatif adalah kunci. Meminimalisasi dampakdampak negatif dari pembelajaran jarak jauh, seperti learning loss, tekanan psikologi, angka putus sekolah, dan lain-lain. Juga, memastikan bahwa sekolah yang menjalankan pembelajaran tatap muka memenuhi protokol kesehatan.

Bagaimana menjamin anggaran yang diterima Kemendikbud tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan di Indonesia?

Perlu adanya cost benefit analysis untuk melihat apakah cost yang dikeluarkan sesuai dengan benefit yang didapat. Ini merupakan studi yang sangat kompleks, apalagi di dunia pendidikan yang luas dan terkadang abstrak dalam menentukan manfaat. Perlu digandeng lembaga-lembaga penelitian. Lalu juga, perlu adanya asesmen yang mengevaluasi kinerja sistem pendidikan secara keseluruhan, oleh sebab itulah diadakan AN.

Apa saran dan masukan Ibu terhadap capaian Kemendikbud tahun 2020 dan kebijakan dan program 2021?

2020 merupakan dasar pijakan kebijakan dan program-program pemerintahan yang baru, dan juga sempat terdisrupsi dengan adanya pandemi. 2021 kita harap Kemendikbud dapat mengakselerasi program yang ada terutama dalam penanganan pendidikan di masa pandemi, dan saya harap di semester kedua keadaan sudah lebih baik, dan kita bisa langsung melompat melakukan terobosan-terobosan yang kemarin sempat tertunda. (*)

Tetap Senang Seperti Belajar di Kelas

Judul : Serunya Belajar di Rumah:

Tahun Terbit : 2020

Penerbit : Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Halaman · 40 hlm · ill · 21 cm

Bahasa : Indones



AAT INI adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bidang pendidikan. Pendidikan yang pada awalnya dilakukan secara langsung di kelas berubah total menjadi dilakukan secara daring.

Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap dengan cermat untuk mengubah konsep pendidikan tersebut guna memprioritaskan aspek kesehatan baik guru, tenaga kependidikan, maupun peserta didik. Pendidikan di Indonesia saat ini dilakukan secara daring (dalam jaringan) di rumah. Adanya perubahan tersebut membuat banyak guru dan orang tua sedikit kebingungan untuk mencari inovasi pembelajaran di rumah agar anak-anaknya tidak bosan.

Oleh karena itu, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku yang berjudul "Serunya Belajar di Rumah: Seri Pendidikan Orang Tua" pada tahun 2020. Buku ini berisi enam topik pembahasan, yaitu Belajar, Gaya Belajar

> Anak, Tipe Kecerdasan Anak, Rumahku Kelasku, Lakukan Ini, serta Hentikan dan Hindari.

Topik-topik tersebut
diharapkan dapat dipahami
oleh orang tua agar dapat
menciptakan pembelajaran
yang menarik di rumah
sehingga anak tetap senang
belajar seperti berada di
dalam kelas.

Buku ini sangat penting dibaca oleh orang tua karena orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak khususnya anak usia dini. Buku ini dapat menjadi salah satu pegangan bagi orang tua untuk lebih mengenal karakter anaknya, tipe kecerdasannya sehingga dapat memaksimalkan masa emas tumbuh kembangnya.

Sangat perlu bagi orang tua mengetahui gaya belajar anaknya karena setiap anak memiliki gaya yang berbeda-beda. Gaya belajar tersebut yang akan mempengaruhi orang tua dalam menciptakan inovasi pembelajaran di rumah. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran A belum tentu dapat diterapkan kepada anak dan proses pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar akan berpengaruh pada proses penyerapan pengetahuan yang diberikan.

Buku dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi menarik yang dapat memudahkan pembaca memahami isi buku tersebut. Selain itu juga, melalui buku ini diharapkan dapat membantu orang tua untuk mengajarkan keterampilan abad 21 yang meliputi kualitas karakter yang bagus, literasi dasar, dan kompetensi 4K (kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreatif).

Tertarik membaca buku ini? Dapatkan dengan mengunjungi tautan ini http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/20665 dan unduh bukunya. Atau dapat pula memindai kode QR berikut. (RWT)



PENGGUNAAN KOLEKSI ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD TAHUN 2020

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sejumlah tempat publik ditutup, termasuk perpustakaan. Meski ditutup, pemustaka tidak surut minat untuk meminjam dan mengakses koleksi di perpustakaan Kemendikbud. Hal ini terlihat dari statistika penggunaan koleksi elektronik perpustakaan Kemendikbud, sebagaimana tersaji dalam table berikut.



Jenis Layanan Daring	Jumlah Koleksi	Penggunaan Koleksi
Repositori Institusi Kemendikbud	14.013	2.971.631
Eperpusdikbud	3.733	81.006
Pustaka Digital	2.593	3.516
TOTAL	20.339	3.056.153

Penggunaan Koleksi Elektronik Perpustakaan Kemendikbud Per Bulan Tahun 2020

Jenis Layanan Daring	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
Repositori Institusi Kemendikbud	193,969	205,176	513,065	266,010	184,866	214,166	240,869	339,360	406,083	362,513	30,764	14,790
Eperpusdikbud				6,976	4,151	6,569	10,278	8,828	7,675	13,448	11,903	11,178
Pustaka Digital											1,940	1,576

Ayo, manfaatkan layanan daring yang dimiliki perpustakaan Kemendikbud untuk kebutuhan pustakamu. **(RWT)**



Repositori Institusi Kemendikbud http://repositori.kemdikbud.go.id



Eperpusdikbud http://perpustakaan.kemdikbud.go .id/eperpusdikbud



Pustaka Digital Kemendikbud http://pustaka-digital.kemdikbud.go.id



June & Kopi (2021)

Jalinan Persahabatan Manusia dan Hewan

Sebuah film keluarga kembali hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada akhir bulan Januari 2021, judulnya June & Kopi. Ditayangkan di Netflix, film ini bertema tentang persahabatan yang terjalin antara manusia dan anjing. Yang menarik, ternyata June & Kopi adalah film Indonesia kedua yang bertema hubungan persahabatan antara manusia dan anjing. Film pertama berjudul Boni dan Nancy dirilis sudah cukup lama, yakni pada tahun 1974. Di Indonesia, kisah persahabatan antara manusia dan hewan, terutama anjing, memang belum banyak diangkat ke layar lebar.

ILM KARYA sutradara Noviandra
Santosa ini berkisah tentang Aya
(Acha Septriasa) yang menyelamatkan
anjing jalanan (Sebutan untuk anjing liar,
bukan peliharaan). Awalnya, sang suami,
Ale (Ryan Delon) menolak keberadaan
anjing peliharaan baru di rumah, karena
mereka sudah memiliki Kopi, seekor anjing
berbulu hitam berjenis staffordshire
terrier. Namun, Aya bersikeras untuk
memelihara anjing liar yang kemudian
diberi nama June itu, maka resmilah June
menjadi bagian dari keluarga mereka.

Meskipun berjudul June & Kopi, sesungguhnya jalan cerita lebih berfokus kepada June. Tingkah laku June yang lincah dan ekspresif mendominasi jalan cerita. Di sisi lain, Kopi memiliki sifat lebih kalem dan cuek. June digambarkan memiliki trauma. la ketakutan sekaligus bersikap waspada jika bertemu dengan anak-anak kecil, karena pengalamannya yang sering diganggu dan dikejar anak-anak perkampungan dulu. Hal ini juga menjadi kekuatiran Ale saat Aya mengandung. Ale khawatir June



Pada akhir film, sebuah kampanye penting diselipkan. Pembuat film menyatakan tidak mendukung pembelian dan penjualan anjing. Mereka mengimbau agar penonton mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan memelihara hewan.

nantinya tidak bisa menerima keberadaan anak kecil di rumah. Itu artinya, jika terjadi sesuatu yang membahayakan anak mereka kelak, June harus keluar dari rumah.

Namun, ternyata yang dikhawatirkan tidak terjadi. June justru menjadi sahabat sejati Karin (Mikayla Rose Hilli), putri Ale dan Aya, dari mulai saat ia lahir sampai dengan duduk di Sekolah Dasar. Hingga suatu ketika, keluarga Ale dihadapkan pada situasi berbahaya. Di situ June dan Kopi menunjukkan bahwa mereka betul-betul bagian dari keluarga.

Kisah June & Kopi ini ternyata terinspirasi dari pengalaman pribadi sang sutradara Noviandra Santosa. Tokoh June diangkat dari cerita anjing adopsi miliknya yang memiliki tiga kaki dan takut kepada laki-laki. Sementara Kopi terinspirasi dari anjing pertama yang diadopsi Noviandra bernama Cody. Tidak heran jika adegan-adegan interaksi antara manusia dan anjing dalam film ini sebagian besar diadopsi dari kedekatan Noviandra dengan anjing miliknya.

Ada fakta menarik lain yang perlu diketahui seputar film ini. Kedua anjing yang menjadi pemeran utama dalam film June & Kopi dimainkan oleh anjing jalanan yang ditemukan di tempat penampungan. Sang sutradara Noviandra sendiri yang menjadi pelatih bagi anjing berjenis mongrel dan staffordshire

terrier itu. Selama dua bulan lebih kedua anjing tersebut dilatih. Bukan hanya dilatih berakting, tetapi mereka juga diajari untuk menyampaikan emosi.

Pada akhir film, sebuah kampanye penting diselipkan. Sebelum memasuki teks akuan (credit title), tercantum bahwa seluruh hewan yang tampil dalam film adalah hasil penyelamatan (rescue). Pembuat film menyatakan tidak mendukung pembelian dan penjualan anjing. Mereka mengimbau agar penonton mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan memelihara hewan. Untuk itu, penonton diminta untuk mempelajari lebih tentang adopsi hewan dan dipersilakan untuk berkunjung ke penampungan hewan.

Film June & Kopi membawa angin segar bagi dunia perfilman Indonesia. Ke depan, bukan tidak mungkin akan ada sutradara-sutradara lain yang mengangkat kisah antara manusia dan hewan. Tidak hanya jalan cerita yang seringkali menyentuh perasaan, namun lebih dari itu, hubungan antara manusia dan hewan memberikan pelajaran tentang kasih sayang yang luas, mengingatkan bahwa sikap saling menghargai dan membantu tetap penting di antara makhluk hidup. Kesetiaan yang terkadang dilanggar dalam hubungan antarmanusia justru "dipegang teguh" oleh hewan. (PPS)





Produser: Noviandra Santosa

Skenario: Noviandra Santosa, Titien Wattimena

Pemeran: Acha Septriasa, Makayla Rose Hili, Ryan Delon

Musik: Joy Ngiaw

Sinematografi: Budi Utomo

Penyunting: Maulana Ishak, Monge Perusahaan Produksi: Aurora Film Distributor: Netflix Originals

Rilis: 28 Januari 2021 Durasi: 90 menit Bahasa: Indonesia



Unduh aplikasi majalah JENDELA melalui Play Store dan App Store secara GRATIS





0













http://bit.ly/majalahjendela

https://bit.ly/MajalahJendela



kemdikbud.go.id



jendela.kemdikbud.go.id



Majalah Jendela Dikbud













Perjalanan Pantun Jadi Warisan Budaya Takbenda Dunia

Satukan Tekad Lestarikan Tradisi Pantun



Pada akhir tahun 2020, pantun ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda (*intangible heritage*) oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Penetapan tersebut berlangsung pada sidang UNESCO sesi ke-15 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* di Paris, Prancis, pada 17 Desember 2020. Penetapan ini merupakan keberhasilan diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia.

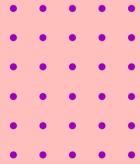
ANTUN ADALAH BENTUK puisi Melayu termasuk di dalamnya Indonesia, di mana tiap bait (kuplet) biasanya terdiri atas empat baris yang bersajak (a-b-a-b), tiap larik biasanya terdiri atas empat kata. Baris pertama dan baris kedua pantun biasanya untuk tumpuan atau sampiran sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun menjadi tradisi budaya ke-11 Indonesia yang diakui oleh UNESCO.

Perjuangan ini dimulai dari tahun 2017, di mana Indonesia dan Malaysia mengusulkan "Pantun, Tradisi Lisan Melayu (*The Malay Oral Tradition*)" sebagai pengusulan bersama.
Pengusulan bersama ini sesuai dengan visi dan misi UNESCO untuk mendorong dialog antarbudaya, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai antarmasyarakat dunia yang akan mendorong terciptanya perdamaian.

Pengajuan ini merupakan inisiatif komunitas Pantun di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau melalui Lembaga Adat Melayu bersama Asosiasi Tradisi Lisan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, serta difasilitasi dan didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan juga Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Alasan pengusulan pantun ini adalah untuk mengembalikan lagi roh kesantunan dan kebaikan budi secara diplomatis, egaliter, dan tidak mengenal hirarki. Berbalas pantun mengajarkan akan persamaan kedudukan. Pantun juga mengajarkan untuk menggunakan bahasa secara halus. Dari segi diplomasi, pantun mengajarkan untuk tidak menyakiti secara fisik atau menimbulkan konflik. Dalam pantun kita diajarkan untuk menempatkan diri secara rendah hati dan tidak sombong.

Setelah pengusulan tersebut,
Kemendikbud melalui Direktorat
Jenderal Kebudayaan terus
mempromosikan pantun kepada
masyarakat terutama generasi muda.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
antara lain pameran, lokakarya,
lomba, dan lain-lain. Melalui kegiatankegiatan ini, diharapkan masyarakat
dapat mengambil peran sesuai
dengan kemampuannya dalam upaya
melestarikan warisan budaya takbenda
Indonesia, yang memiliki peran penting
dalam membangun peradaban bangsa.



Pantun sebagai warisan takbenda dinilai memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial, namun juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral.

Penetapan pantun sebagai warisan budaya takbenda oleh UNESCO disambut gembira masyarakat Indonesia. Kemendikbud mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga Malaysia. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, mengatakan UNESCO menetapkan pantun sebagai warisan takbenda karena dinilai memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial

namun juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral. Pesan yang disampaikan melalui pantun umumnya menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antarmanusia.

Penetapan ini bukan merupakan akhir perjuangan, melainkan langkah awal pelestarian tradisi mulia bangsa Indonesia. Hilmar Farid mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai bergerak bersama dan menyatukan



TENTANG PANTUN

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang. Pantun tidak hanya ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia, melainkan juga di acara-acara hiburan adat sampai program hiburan komedi di stasiun televisi. Setiap bait pantun terdiri atas empat baris serta memiliki sampiran dan isi. Tidak hanya sekadar berisi nasihat dan imbauan, penyampaiannya pun memiliki ciri khas yang begitu kental.

CIRI-CIRI PANTUN

Tiap Bait Terdiri atas Empat Baris

Tiap bait biasanya berisi untaian kata-kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri bergantung jenis puisinya. Tiap baitnya selalu terdiri atas empat baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik.

8-12 Suku Kata di Tiap Baris

Mulanya pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isi. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8–12 suku kata.

Memiliki Sampiran dan Isi

Salah satu keunikan pantun adalah memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiswa ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Pengantar isi pantun inilah yang kerap dikenal sebagai sampiran. Sampiran akan selalu berada di baris pertama dan kedua. Sementara isi pantun menyusul di posisi baris ketiga sampai keempat

Berima a-b-a-b

Pantun memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah a-b-a-b.
Yang dimaksud dengan rima a-b-a-b adalah ada kesamaan bunyi antara baris pertama dengan ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi, kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi.

tekad dengan satu tujuan: membuat pantun tetap hidup dan tidak hilang ditelan zaman. Langkah berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah memperkenalkan pantun kepada generasi muda agar mencintai tradisi lisan ini.

Bagi Indonesia, keberhasilan penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Takbenda tidak lepas dari keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun berbagai komunitas terkait. Komunitas yang terlibat antara lain Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Lembaga Adat Melayu, Komunitas Joget Dangdung Morro, Komunitas Joget Dangdung Sungai Enam, Komunitas Gazal Pulau Penyengat, Sanggar Teater Warisan Mak Yong Kampung Kijang Keke, serta sejumlah individu dan pemantun Indonesia. (WID)



Pesan yang disampaikan melalui pantun umumnya menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antarmanusia.

JENIS-JENIS PANTUN

Pantun Nasihat

Menyampaikan pesan moral dan didikan.

Pantun Jenaka

Memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik.

Pantun Agama

Memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan pencipta-Nya.

Pantun Teka-teki

Memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir.

Pantun Berkasih-kasihan

Erat kaitannya dengan cinta dan kasih sayang.

Pantun Anak

o

Berisi nasihat yang lebih ringan dan menyangkut hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh si kecil.

Jalan-jalan pergi ke pasar Ke pasar membeli sayur Saat muda rajinlah belajar Supaya tua hidup makmur

Kalau ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi Kalau anda ke warung padang Bolehlah kita ditraktir lagi



Praktik Baik Pengurangan Risiko Bencana Covid-19 di Sekolah

Prinsip Humanis, Akomodasi Kebutuhan Warga Sekolah

Selama pandemi Covid-19 terjadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Kebijakan itu langsung direspons oleh satuan pendidikan dengan meniadakan pertemuan tatap muka sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Penutupan sekolah secara massif ini baru pertama kali dilakukan sepanjang sejarah Indonesia. Penutupan sekolah ini berdampak besar, tidak hanya pada siswa namun juga kepada seluruh warga sekolah. Dalam berbagai kasus, beberapa sekolah swasta meliburkan guru dan karyawan tanpa kejelasan gaji. Kebijakan ini ditempuh karena sekolah tidak memiliki manajemen yang terencana, kapasitas finansial yang rapuh, dan para pemimpin sekolah yang kurang mampu menghasilkan kebijakan yang menentramkan semua pihak.

Untuk melihat bagaimana praktik baik yang dilakukan sekolah, terutama sekolah swasta, Dwitya Sobat Ady Dharma dari *Centre for Studies on Inclusive Education* melakukan kajian pada Sekolah Tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut peneliti, sekolah ini memiliki manajemen khas dalam penanggulangan bencana. Rangkuman kajian tersebut tersaji di bawah ini.

Sekolah Tumbuh merupakan sekolah Inklusi Multikultur yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang terdiri atas SD Tumbuh 1, SD Tumbuh 2, SD Tumbuh 3, SD Tumbuh 4, SMP Tumbuh, dan SMA Tumbuh. Walaupun belum memiliki manajemen mitigasi bencana Covid-19, sekolah ini berupaya ekstra menyediakan layananlayanan pendidikan, pengaturan pegawai, dan pengaturan aktivitas yang memenuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Pembuatan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana Covid-19 yang tertata dan bersifat dinamis serta selalu diperbaharui dengan memperhatikan situasi terkini, sangat diperlukan untuk tetap mencapai tujuan bersama.

Sebagai sekolah yang memperhatikan keselamatan setiap warga sekolah, perencanaan mitigasi

bencana juga dilakukan. Berdasarkan penelusuran dokumen dan wawancara, Sekolah Tumbuh sudah mengedepankan mitigasi bencana yang tersistem, namun hanya pada bencana yang sudah lumrah terjadi di Indonesia. Sekolah Tumbuh belum memiliki pengalaman dalam penanganan Covid-19, sehingga kebijakan-kebijakan sebelum terjadi pandemi belum tersusun.

Akan tetapi, kebijakan terkait hidup bersih dan sehat sudah sejak lama dilakukan. Misalnya pemeriksanaan kesehatan oleh tim medis Bethesda setiap satu bulan sekali, pengelolaan kantin sehat, pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), penyediaan wastafel yang mencukupi, kamar mandi yang dijaga kebersihannya, dan general cleaning yang dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan. Beberapa kegiatan terkait dengan pemeliharaan kebersihan dan kesehatan juga bekerja sama dengan wali murid, misalnya penyediaan makanan sehat kantin oleh wali murid/komite, seminar kesehatan, maupun narasumber kesehatan dari pihak orang tua.

Bergerak Cepat

Setelah diumumkan sebagai pandemi dunia, Sekolah Tumbuh segera melakukan rapat untuk menentukan langkah ke depan. Rapat perdana ini memutuskan kegiatan belajar mengajar dan agenda lain dalam sekolah akan tetap berlangsung. Pelaksanaan kegiatan terbatas dan penghentian kegiatan luar ini dilakukan dalam dua pekan dari tanggal 23 Maret hingga 10 April 2020. Selama dua pekan ini, sekolah meniadakan sementara kegiatan non-KBM di dalam sekolah, termasuk penelitian mahasiswa yang bersifat tatap muka. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam dua pekan ini, akan mengikuti protokol kesehatan yang dirancang di sekolah.

Setelah terbit Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan dan Surat Edaran Gubernur DIY, serta Surat Edaran Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga DIY terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, Sekolah Tumbuh mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung operasional praktis sehingga dapat diterapkan di Sekolah Tumbuh. Kebijakan dikeluarkan secara bertahap dengan melihat perkembangan situasi.

Sebagai wujud empati sosial, Sekolah Tumbuh mengambil kebijakan untuk pembelajaran daring dan melakukan work from home (WFH) bagi edukator dan staf. Kebijakan untuk peniadaan kegiatan belajar mengajar, baik kegiatan intrakulikuler maupun ekstrakulikuler diambil karena melihat perkembangan wabah yang semakin meluas.

Menanggapi perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring, sekolah menginstruksikan semua guru untuk membuat gambaran program yang diharuskan diunggah di platform yang dipilih setiap satu minggu sekali, yang dilanjutkan dengan pemberian materi dan tugas. Sekolah juga mendorong orang tua untuk terlibat dalam pembelajaran dengan memberikan pendampingan.

Pada masa WFH ini, guru dan staf melakukan presensi daring dan mendapatkan penyesuaian upah yang diterima. Sekolah juga memberi imbauan kepada seluruh orang tua/wali untuk mengurangi dan membatasi aktivitas di luar rumah yang melibatkan banyak orang. Sekolah menekankan kepada siswa untuk melakukan kegiatan dari rumah. Lembaga juga terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengikuti perkembangan informasi global, dan mengikuti arahan pemerintah untuk menentukan langkah ke depan.

pihak sekolah untuk menjaga mutu layanan. Sekolah juga melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan agenda akademik, tata cara penilaian, evaluasi, dan ujian sekolah yang akan ditetapkan oleh masingmasing koordinator kurikulum di sekolah masingmasing.

Kualitas Setara Pembelajaran Tatap Muka

Dalam masa ini, pembayaran uang sekolah dan kewajiban keuangan lainnya tetap berlaku sesuai dengan ketentuan sekolah. Kebijakan ini diambil karena sekolah berupaya membuat pembelajaran daring memiliki kualitas yang setara dengan pembelajaran tatap muka. Guru juga berusaha keras dalam membuat gambaran program, membuat materi, media, evaluasi, dan komunikasi yang intensif dengan orang tua/ wali. Pengalaman yang dibangun dibuat dengan semangat yang hampir sama dengan pengalaman tatap muka sehingga siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang penuh makna.

Berada dalam wilayah DIY yang masih memegang erat budaya Jawa, spirit yang dikembangkan di Sekolah Tumbuh dalam pengambilan kebijakan akan terkesan mengedepankan keyakinan pada kebatinan, walaupun sejak berdiri mendeklarasikan sebagai sekolah inklusi multikultur. Prinsip yang harus dipegang adalah prinsip harmoni, keselarasan dan keseimbangan antara jagad gedhe (makrokosmos) dan jagad cilik (mikrokosmos). Dari pelestarian prinsip ini, kebijaksanaan akan terjadi apabila manusia menguasai alam lahir yang muaranya akan menuju batin. Oleh sebab itu, salah satu cara membahagiakan seluruh staf dan edukator adalah dengan memberikan pengayemayem (bantuan) agar tercipta ketenangan batin.

Menilai perlunya kebijakan yang berkelanjutan sebagai langkah nyata melaksanakan pendidikan yang kontekstual menanggapi masa tanggap darurat ini, Sekolah Tumbuh mengeluarkan kebijakan lanjutan. Kegiatan belajar mengajar (intrakulikuler) dan klub (ekstrakulikuler) tetap diselenggarakan dalam moda daring pada 1 April 2020 sampai waktu yang belum dapat ditentukan.

Pembelajaran daring ini akan terus dipantau oleh



Menanggapi perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring, sekolah menginstruksikan semua guru untuk membuat gambaran program yang diharuskan diunggah di platform yang dipilih setiap satu minggu sekali, yang dilanjutkan dengan pemberian materi dan tugas. Sekolah juga mendorong orang tua untuk terlibat dalam pembelajaran dengan memberikan pendampingan.



Bangun Budaya Solidaritas

Bagi masyarakat Jawa, memberian pengayem-ayem ketika dalam masa pageblug menjadi sesuatu yang sakral. Berbagai usaha ini dilakukan untuk membuat masyarakat tenang dan sebagai penguatan bahwa bencana pasti akan segera berakhir. Meskipun berbagai tradisi sudah sangat melekat erat di Sekolah Tumbuh, pengayem-ayem pada masa pageblug Covid-19 dilakukan bukan pada ritual irasional, namun lebih pada pemberian bantuan sembako kepada seluruh pegawai. Pengayem-ayem dalam bentuk sembako ini diberikan sebagai bentuk perhatian dan dukungan yayasan terhadap kesehatan seluruh warga Sekolah Tumbuh.

Yayasan memberikan dua paket sembako kepada setiap staf. Satu paket sembako untuk dipakai sendiri dan satu paket sembako diwajibkan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan. Pemberian sembako dengan konsep *charity* ini sebagai bentuk syukur bahwa seluruh warga sekolah masih dapat bekerja dan beraktvitas walau dengan penyesuaian. *Pengayem-ayem* tahap kedua juga dilakukan oleh komite sekolah masingmasing. Di Tumbuh *High School*, komite sekolah juga memberikan paket sembako sebagai wujud apresiasi.

Pembatasan sosial berupa penutupan sekolah, namun tetap mendapatkan upah yang disesuaikan, merupakan salah satu pengayem-ayem yang paling penting di kalangan seluruh staf.

Penerapan Prinsip Humanis

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) Covid-19 di Sekolah Tumbuh sudah tertata yang dapat dikelompokkan menjadi kebijakan kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Setiap kebijakan selalu diawali dengan rapat para pemimpin sekolah yang kemudian diterjemahkan dengan surat edaran.

Kebijakan PRB di Sekolah Tumbuh menerapkan prinsip humanis yang mampu mengakomodasi kebutuhan warga sekolah. Penerapan kebijakan dilakukan dengan alur yang sistematis sehingga mudah dipahami oleh warga sekolah dan dibuat dengan mengedepankan musyawarah para pemimpin. Penerapan kebijakan dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga menjadikan sekolah menjadi aman dan siap ketika tatap muka sudah mulai dibuka.

Pihak sekolah dan yayasan diharapkan lebih memperhatikan konsistensi penerapan kebijakan sebagai antisipasi penularan wabah di lingkungan sekolah. Diperlukan juga pengawasan yang lebih ketat, misalnya dengan membuat konsekuensi yang mengikat semua warga sekolah apabila melanggar ketentuan dan juga pemberian apresiasi pada pihak yang konsisten menjalankan kebijakan. (ANK)

Artikel ini ditulis ulang dari penelitian yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 13, No. 2/2020, hlm. 79—92 berjudul " Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Covid-19:

Pengalaman Sekolah Tumbuh" oleh Dwitya Sobat Ady Dharma – Centre for Studies on Inclusive Education. Jika pembaca ingin membaca kajian dengan lengkap, dapat memindai kode QR berikut



BUNYI-BUNYI BAHASA

(BAGIAN 1: VOKAL)

Dalam bahasa Indonesia, terdapat dua bunyi bahasa, yaitu vokal dan konsonan. Teori ini diajarkan sejak seseorang mengenal alfabet dan kata. Kali ini redaksi Jendela menghadirkan bunyi bahasa pertama, yaitu vokal. Seperti apa bunyi vokal tersebut? Simak penjelasan berikut ini.

Vokal karakteristik atau kualitas vokal ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

Tinggi posisi lidah di dalam rongga mulut Bagian lidah yang berubah posisi Bentuk bibir ketika vokal itu dihasilkan

Pada saat pengucapan vokal, lidah atau tepatnya bagian-bagian tertentu lidah dapat dinaikkan atau diturunkan sehingga rongga mulut mencapai ukuran dan bentuk tertentu. Dalam menghasilkan vokal, posisi lidah di dalam rongga mulut bukan merupakan hambatan, melainkan merupakan alat untuk menciptakan ruang resonan si bunyi yang dikehendaki.

Atas dasar posisi lidah di dalam rongga mulut itu,vokal dapat digolongkan menjadi:

Vokal tinggi

(vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah tinggi)

Vokal Sedang

(vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah sedang)

Vokal Rendah

(vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah rendah)

Untuk mencapai bentuk rongga resonansi tertentu di dalam rongga mulut, lidah—terutama bagian depan, tengah, dan belakang lidah—juga memainkan peranan yang sangat penting.

Berdasarkan bagian lidah yang dinaikkan atau diturunkan itu, vokal dibedakan atas vokal depan (vocal yang dihasilkan dengan mengubah posisi lidah bagian depan), vokal tengah (vokal yang dihasilkan dengan mengubah posisi lidah bagian tengah), dan vokal belakang (vokal yang dihasilkan dengan mengubah posisi lidah bagian belakang).

Di samping posisi lidah dan bagian lidah, kualitas vokal juga dipengaruhi oleh bentuk bibir ketika vokal itu diucapkan. Atas dasar bentuk bibir itu, vokal dapat digolongkan menjadi vokal bundar (vokal yang dihasilkan dengan bentuk bibir bundar) dan vokal tak bundar (vokal yang dihasilkan dengan bentuk bibir normal atau cenderung dilebarkan ke samping). Vokal [u] dan [o] termasuk jenis vokal bundar, sedangkan vokal [a] dan [i] termasuk vokal tak bundar.

Dengan tiga faktor yang memberi ciri vokal itu, akan dihasilkan, misalnya, vokal tinggi depan bundar yang berarti vokal itu dihasilkan dengan posisi lidah bagian depan tinggi dan bibir bundar. (LAN)

Sumber: Tata bahasa baku bahasa Indonesia. Edisi keempat. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.



SENARAI KATA SERAPAN



NO	BENTUK Serapan	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI
1	amputasi	amputation	Inggris	Pemotongan (anggota badan), terutama kaki dan tangan, untuk menyelamatkan jiwa seseorang;
2	akrab	aqrab	arab	dekat dan erat (tentang persahabatan)
3	bangku	banco	portugis	papan dan sebagainya (biasanya panjang) berkaki untuk tempat duduk; kaki bangku kecil tumpuan kaki
4	kimia	chemistry	Inggris	ilmu tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur atau zat;
5	nona	dona	portugis	sebutan bagi anak perempuan atau wanita yang belum menikah
6	pesta	festa	portugis	n perjamuan makan minum (bersuka ria dan sebagainya); perayaan: panen bagi mereka merupakan suatu;
7	ideal	ideaal	Belanda	sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan
8	klop	klopt	Belanda	sesuai dengan yang seharusnya (tidak kurang dan tidak lebih) atau sesuai dengan apa yang telah dikatakan orang sebelumnya
9	maraton	marathon	Inggris	"1 n perlombaan lari jarak jauh (10 km atau lebih); 2 a ki terus-menerus (tanpa berhenti)"
10	oksigen	oxygen	Inggris	gas dengan rumus O2, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, merupakan komponen dari kerak bumi; zat asam; unsur dengan nomor atom 8, berlambang O, dan bobot atom 15,9994;
11	teknologi	technologie	Belanda	n 1 metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; 2 keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlu- kan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia;
12	wahyu	waḥy	arab	n petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya
13	suster	zuster	Belanda	n 1 wanita yang menjadi anggota perkumpulan kerohanian yang hidup di dalam biara: itu sekarang tinggal di Biara Ursulin Bandung; 2 cak juru rawat wanita; perawat;

LAF

(Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia)

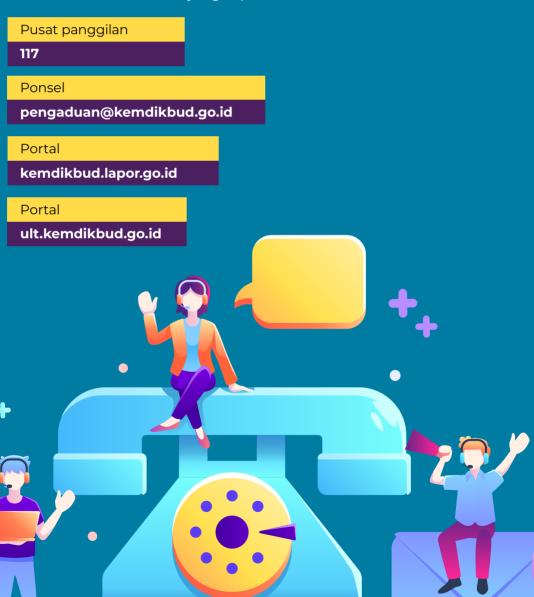
.

INFORMASI KONTAK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap melayani permohonan informasi dan layanan kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses:









Majalah Jendela

berhasil meraih Penghargaan Perak pada ajang *Inhouse Magazine Awards* (InMA) 2021 untuk kategori Majalah Elektronik Kementerian/Lembaga Terbaik.



